

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BLORA**  
( Studi Kasus Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan /  
P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora )

**TESIS**

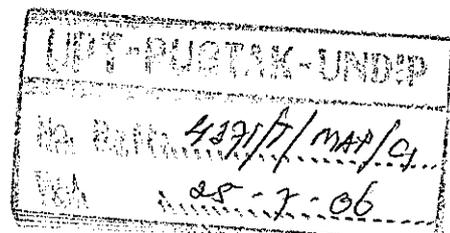
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S - 2

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro**  
**Program Studi : Magister Ilmu Administrasi**  
**Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



**IRFAN AGUSTIAN ISWANDARU**  
**D4E003033**

**PROGRAM PASCA SARJANA**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**  
**2005**



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN  
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN BLORA  
(Studi Kasus Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/P2KP  
di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora )

Dipersiapkan dan disusun oleh  
IRFAN AGUSTIAN ISWANDARU

D4E 003033

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : 25 Agustus 2005

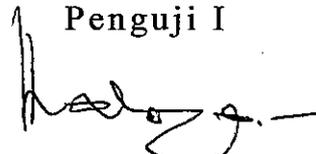
Susunan Tim Penguji

Ketua Penguji



Drs. SUNDARSO, SU

Anggota Dewan Penguji lain:  
Penguji I



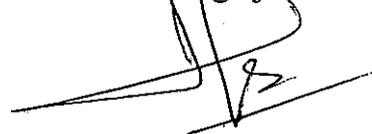
Prof. Drs. HARTOYO

Sekretaris Penguji



Dra. HARTUTI PURNAWENI, MPA

Penguji II



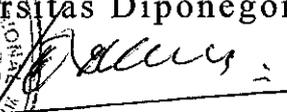
Drs. SLAMET S., M.Si

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal :



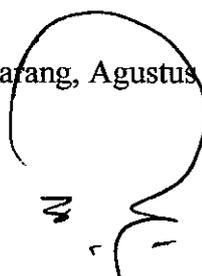
Ketua Program Studi MAP  
Universitas Diponegoro Semarang

  
Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Agustus 2005



IRFAN AGUSTIAN ISWANDARU

*Motto: "Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang  
bersabarlah yang dicukupkan pahala  
mereka tanpa batas"  
(QS: Aj-Jumar:10)*

*Kupersembahkan :*

*Kepada Ibu, Bapak (alm.), Wahyu  
Istriku, Husein dan Tegar anakku  
Terimakasih atas pengertiannya  
selama ayah tinggal kuliah  
Semoga karunia ini mendapat  
barokah dari Allah S.w.t. Amin*

## RINGKASAN

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan upaya menanggulangi krisis ekonomi dan meningkatnya angka kemiskinan khususnya di perkotaan. Sebagai program dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat miskin kota melalui pengelolaan di tingkat Kelurahan yang berguna untuk mendukung lebih lanjut pelaksanaan program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Bloro = 92.840 jiwa atau 11,05 % dari total 840.184 jiwa penduduknya. Jumlah penduduk miskin Kecamatan Cepu = 11.735 jiwa atau 15,67 % dari total 74.889 jiwa penduduknya. Jumlah penduduk miskin Kelurahan Cepu = 2.836 jiwa atau 17,56 % dari total 16.145 jiwa penduduknya. **(BPS:2005)**. P2KP bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. P2KP yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Bloro merupakan P2KP Fase I yang ditetapkan pemerintah sejak tahun 1999. P2KP Kabupaten Bloro ditetapkan di 3 (tiga) Kelurahan dengan alokasi dana Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perincian : Kelurahan Cepu Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Kelurahan Balun Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Kelurahan Jepon Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). P2KP fase II dan selanjutnya akan dilaksanakan yang diharapkan mampu mencakup kelurahan lain di seluruh Indonesia. Kegiatan P2KP : memberikan dana pinjaman untuk usaha produktif, memberikan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan penguatan lembaga kemasyarakatan di tingkat Kelurahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bloro yaitu P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu dinyatakan baik oleh 52,5 % responden dan sebanyak 12,5 % responden menyatakan sangat baik . Meskipun demikian terdapat 32,5 % responden menyatakan biasa saja dan 2,5 % responden menyatakan buruk. Implementasi kebijakan P2KP secara umum dikategorikan belum baik. Variabel yang menyebabkan implementasi kebijakan P2KP belum baik meliputi : kemampuan organisasi, pengawasan dan komunikasi. Variabel kemampuan organisasi dinyatakan baik hanya oleh 60 % responden, 37,5 % responden menyatakan biasa saja dan sisanya 2,5 % responden menyatakan kemampuan organisasi buruk. Variabel pengawasan dinyatakan baik hanya oleh 47,5 % responden, 30 % responden menyatakan buruk, 22,5 % responden sisanya menyatakan biasa saja. Variabel komunikasi dinyatakan baik hanya oleh 37,5 % responden,

35 % responden menyatakan buruk, 27,5 % responden sisanya menyatakan biasa saja Hasil uji statistik dengan menggunakan uji statistik SPSS (*Statistic Package for Social Science*) dengan df (*degree of freedom*) = 3 dan tingkat signifikansi yang ditetapkan 1 % maka nilai Chi-Square ( $X^2$ ) tabel = 11,345 (lihat lampiran tesis). Nilai Chi-Square hitung lebih besar dari Chi-Square tabel (43,947 > 11,345). Besar koefisien konkordansi Kendall's (W) = 0,366 (angka ini merupakan koefisien yang berkisar antara 0 sampai dengan 1), sehingga hipotesis alternatif yang diajukan diterima dan antar variabel memiliki hubungan positif dan signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan P2KP belum baik, dengan komunikasi dalam pelaksanaan P2KP masih buruk, baik komunikasi organisasi pelaksana BKM P2KP dengan KSM Kelompok sasaran atau komunikasi BKM P2KP dengan sesama unit organisasi lain dalam struktur organisasi pelaksanaan P2KP (Gambar 1). Kondisi ini menyebabkan keluarga miskin (kelompok sasaran) tidak dapat secara maksimal memahami dan mendukung program P2KP, mereka menganggap P2KP tidak lebih seperti unit simpan pinjam yang sudah ada.

## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian proses implementasi kebijakan P2KP tahap I di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dalam peranannya untuk membantu menangani problem kemiskinan perkotaan melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan lingkungan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini metode kuantitatif. Spesifikasi penelitian ditekankan pada penelitian penjelasan. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan *random sampling*, dan secara *purposive* terhadap anggota KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) penerima manfaat. Pengumpulan data primer melalui pengisian kuesioner dan observasi lapangan, kemudian hasilnya diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi P2KP dikategorikan cukup baik dengan prosentase 65 %. Pengawasan dikategorikan kurang baik dengan prosentase 47,5 %, dan komunikasinya dikategorikan buruk dengan prosentase 37,5 %. Direkomendasikan agar dana P2KP dialokasikan secara berimbang, misalnya alokasi untuk simpan pinjam sebesar 60 %, peningkatan sarana dan prasarana sebesar 20 % dan penguatan lembaga kemasyarakatan sebesar 20 %. Pengawasan melibatkan pemerintah daerah secara aktif, dan komunikasi ditingkatkan melalui pertemuan KSM P2KP rutin 3 (tiga) bulan sekali.

Kata kunci : Implementasi P2KP, kemiskinan perkotaan, pemberdayaan

## ***ABSTRACT***

The objective of this study is to examine the implementation of P2KP program (phase I) at Cepu village/Kelurahan, Cepu sub-district, Blora Regency. This program was intended to promote poverty alleviation in urban areas, by empowering community and developing the area. Quantitative method was employed in this research. It, moreover, emphasized on the explanatory research. Random sampling technique was made use by purposively taking recipients (KSM, Empowering Community Group) members as respondents. Primary data was collected through questioner and field observation, and was then analyzed with SPSS program. The result of the research indicates that P2KP implementation was 65 % success. Implementing organization was 60 % success, controlling was 47,5 % and communication was 37,5 % success. It is recommended that P2KP fund should be well balanced allocated, ie 60 % for economic provision, 20 % for area development and 20 % for society organizational building. Controlling process should involve the local goverment, while communication should be increased through KSM meeting of each at three month periodically.

Keywords : P2KP implementation, urban poverty, empowerment

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.

Penulisan tesis ini merupakan rangkaian kegiatan akademik yang harus diselesaikan oleh Mahasiswa MAP Undip untuk memenuhi sebagian syarat menyelesaikan studi pada Magister Administrasi Publik di Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini . Terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D, selaku ketua program MAP Undip;
2. Prof. Drs. Hartoyo, selaku dosen penguji, terima kasih bekal ilmu tambahan untuk sukses dalam hidup;
3. Bupati Blora, atas kepercayaan dan Ijin Belajar yang diberikan;
4. Drs. Sundarso, SU, selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas kesabaran membimbing penulis;
5. Dra. Hartuti Purnaweni, MPA, selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya meski kondisi sakit tetap berkenan mendampingi;
6. Drs. Slamet S, M.Si, dosen penguji, terima kasih masukan-masukan untuk penulisan tesis;

7. Dosen pengajar di MAP Undip, terima kasih atas materi kuliahnya dan kebersamaannya;
8. Drs. Suryanto, Camat Cepu, terima kasih atas rekomendasi dan dukungannya;
9. Wahyu trimulyani, AP, istri tercinta, Husein Abdullah dan Tegar Falih Abdullah, kedua anakku, yang semuanya penuh pengertian selama ini;
10. Drs. Sumanto, administrasi MAP yang setia mendampingi dan membantu hingga selesai masa studi;
11. Rekan-rekan Mahasiswa MAP angkatan X yang senasib dan seperjuangan, bagi yang belum wisuda, maju terus pantang mundur.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam bentuk apa pun sehingga mampu menyelesaikan studi.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan sempurnaan dalam penulisan tesis ini. Saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan penulisan berikutnya. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat. Amin.

Semarang, Agustus 2005

IRFAN AGUSTIAN ISWANDARU

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
RINGKASAN .....	iv
ABSTRAKSI .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Kegunaan Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	17
1. Kebijakan Publik .....	18
2. Implementasi Kebijakan (Y).....	20
3. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP)...	29
a. Kemampuan Organisasi (X1).....	29
b. Pengawasan (X2) .....	35
c. Komunikasi (X3) .....	38
B. Hubungan antar Variabel .....	41
C. Penelitian yang relevan .....	47
D. Hipotesis.....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Penelitian.....	51
B. Ruang Lingkup .....	52
C. Lokasi Penelitian .....	53
D. Variabel Penelitian .....	53
1. Definisi Konseptual .....	53
2. Definisi Operasional .....	55
E. Jenis dan Sumber Data .....	57
F. Instrumen Penelitian .....	58
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	60
H. Teknik Pengumpulan Data .....	62
I. Teknik Analisa Data .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Diskripsi Wilayah Penelitian .....	67
B. Hasil Penelitian .....	76
B.1. Variabel Implementasi Kebijakan P2KP .....	76
B.2. Variabel Kemampuan Organisasi .....	90
B.3. Variabel Pengawasan .....	101
B.4. Variabel Komunikasi .....	110
C. Analisis Hasil Penelitian .....	117
C.1. Hubungan antara Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP .....	117
C.2. Hubungan antara Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan P2KP .....	119
C.3. Hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP .....	121
C.4. Hubungan antara Kemampuan Organisasi, Pengawasan dan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP..	123

C.5. Pengujian Hipotesis alternatif (Minor) .....	125
C.6. Pengujian Hipotesis alternatif (Mayor) .....	130
D. Diskusi .....	130
<b>BAB V   SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. SIMPULAN .....	135
B. SARAN .....	138
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>
<b>MATRIK VARIABEL .....</b>	<b>146</b>
<b>DAFTAR KUESIONER .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>157</b>

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
I.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP .....	7
I.2. Grafik Perkembangan Dana P2KP Kelurahan Cepu .....	10
II.1. Teori Pelembagaan Program D.C. Korten .....	21
II.2. Tiga Elemen Sistem Kebijakan W. Dunn .....	22
II.3. Model Implementasi Menurut E.S. Quade .....	24
II.4. Model Implementasi Menurut G.C. Edwards III .....	25
II.5. Bangun Teori Penelitian Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora .....	46
II.6. Hubungan Antar Variabel .....	50
IV.1. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora .....	68
IV.2. Struktur Organisasi Pelaksana P2KP BKM “MAKMUR SENTOSA” Kelurahan Cepu Kabupaten Blora .....	71

## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
I.1. Jumlah penduduk miskin Kelurahan Cepu Th. 2002-2004 .....	3
I.2. Alokasi Dana P2KP Tahun 1999 Kabupaten Blora .....	8
I.3. Perkembangan Dana P2KP Th. 2002-2004 Kelurahan Cepu .....	9
III.1. Perkiraan Jumlah Populasi dan Sampel .....	61
IV.1. Komposisi Jumlah Penduduk Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2004 .....	69
IV.2. Tingkat Kesesuaian Penggunaan Dana P2KP Kelurahan Cepu .....	76
IV.3. Tingkat Kecukupan Dana Pinjaman P2KP untuk Usaha Produktif .....	77
IV.4. Tingkat Kecukupan Dana P2KP untuk Membangun/ Mengembangkan Prasarana dan Sarana (peningkatan jalan lingkungan) .....	78
IV.5. Tingkat Kesesuaian Prasarana yang Dibangun P2KP dengan Kebutuhan Masyarakat .....	79
IV.6. Administrasi Kegiatan P2KP .....	80
IV.6. Manfaat P2KP kepada Keluarga Miskin Secara Langsung .....	81
IV.7. Kontribusi Dana Pinjaman P2KP kepada Pengembangan Perekonomian..	82
IV.8. Dampak P2KP dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Miskin .....	83
IV.9. Dampak P2KP dalam Penataan Lingkungan .....	84
IV.10. Dampak P2KP dalam Mengentaskan Keluarga Miskin ke Kondisi yang lebih baik .....	85
IV.11. Dampak P2KP dalam Memberikan Kesempatan mendapatkan lapangan Kerja Baru .....	86
IV.12. Dampak P2KP dalam memberikan Kesempatan Meningkatkan Usaha Produktif .....	87
IV.13. Kategorisasi Penilaian .....	88
IV.14. Kategorisasi Variabel Implementasi Kebijakan P2KP .....	89
IV.15. Tingkat Kecukupan Tenaga Pelaksana P2KP .....	90
IV.16. Tingkat Pendidikan Pelaksana P2KP .....	91
IV.17. Tingkat Pendidikan Pelaksana P2KP .....	91
IV.18. Tingkat Keterampilan Pelaksana P2KP .....	92
IV.19. Tingkat Pengalaman Pelaksana P2KP .....	93
IV.20. Daftar Inventaris Kantor BKM "MAKMUR SENTOSA" Kelurahan Cepu .....	94
IV.21. Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pelaksana P2KP .....	95
IV.22. Tingkat Kesiapan Pelaksana P2KP secara Struktur Organisasi .....	96
IV.23. Tingkat Kewenangan Pelaksana P2KP .....	97

IV.24. Tingkat Kemampuan Orgnaisasi Pelaksana P2KP dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pegawainya .....	98
IV.25. Kategorisasi Penilaian .....	99
IV.26. Kategorisasi Variabel Kemampuan Organisasi .....	99
IV.27. Tingkat Ketersediaan Aturan Pelaksana P2KP .....	101
IV.28. Tingkat Kejelasan dan Kemudahan Memahami Aturan Pelaksana P2KP..	102
IV.29. Tingkat Kesesuaian antara Penetapan Standar dalam Aturan Pelaksanaan P2KP dengan Kondisi Riil Masyarakat .....	102
IV.30. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan P2KP dengan Standar Kegiatan yang Ditetapkan .....	103
IV.31. Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan P2KP dengan Kebutuhan Kelurahan Cepu .....	104
IV.32. Tingkat Obyektivitas dan Kejujuran Organisasi Pelaksana P2KP dalam melaksanakan Pengawasan .....	105
IV.33. Tingkat Kesalahan Pelaksana P2KP dalam Melaksanakan Kegiatan .....	106
IV.34. Tingkat Kecepatan Pelaksana P2KP dalam Memecahkan Masalah .....	107
IV.35. Tingkat Kontinuitas Organisasi Pelaksana P2KP dalam Melaksanakan Pengawasan .....	107
IV.36. Kategorisasi Penilaian .....	108
IV.37. Kategorisasi Variabel Pengawasan .....	109
IV.38. Tingkat Keseringan Sosialisasi P2KP (Penjelasan, pengumuman) oleh Pelaksana P2KP .....	110
IV.39. Tingkat Kualitas Informasi yang diterima .....	111
IV.40. Tingkat Keseringan Koordinasi antar Organisasi Pelaksana P2KP Kelurahan lain .....	112
IV.41. Tingkat Keseringan Komunikasi dengan selain Pelaksana P2KP yang masih memiliki Keterkaitan dengan Program P2KP .....	113
IV.42. Tingkat Keragaman penggunaan Media Komunikasi oleh Pelaksana P2KP (surat edaran, surat kabar, radio, pertemuan) .....	114
IV.43. Tindakan anggota KSM penerima manfaat dalam menyampaikan Permasalahan .....	115
IV.44. Kategorisasi Penilaian .....	116
IV.45. Kategorisasi Variabel Komunikasi .....	116
IV.46. Hubungan antara Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP .....	118
IV.47. Hubungan antara Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan P2KP ...	119
IV.48. Hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP ...	121
IV.49. Uji Statistik hubungan antara Kemampuan Organisasi, Pengawasan dan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP (Rumus Kendall's) ...	122
IV.50. Uji Statistik hubungan antara Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP .....	123
IV.51. Uji Statistik hubungan antara Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan P2KP .....	124

IV.52. Uji Statistik hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP .....	125
IV.53. NPar test Kendall's W Test .....	125
IV.54. Test Statistics .....	126

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah yang dihadapi oleh Negara berkembang seperti Indonesia adalah bagaimana upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi sebagai orientasi pembangunan nasional di satu pihak, dan pemerataan serta pengentasan kemiskinan sebagai acuan pembangunan nasional di lain pihak.

“Kemiskinan adalah kondisi deprivesi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dasar,...” **Dewanta ed. (1995:9)**. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Dengan kata lain kebutuhan dasar (basic needs) tidak dapat dipenuhi, meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.

BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) menetapkan lima kriteria untuk menentukan penduduk yang dapat digolongkan miskin, yaitu (1) Kualitas perumahan, (2) Kualitas Sandang, (3) Kualitas Pangan, (4) Kualitas Keberagamaan, dan (5) Kualitas kesehatan. Pada kualitas perumahan dapat dilihat dari

keadaan rumah suatu keluarga, lantai tanah, semi permanen dan non permanen, dan keadaan lainnya yang tidak mencerminkan kualitas perumahan keluarga yang sehat merupakan salah satu indikator. Kualitas sandang, yang dimaksud adalah apabila pakaian yang dipakai dalam satu forum resmi juga dipakai di rumah, artinya seseorang tidak punya banyak pilihan untuk memilih jenis pakaian sesuai dengan situasi, maka ia dapat dikatakan miskin. Kemudian, apabila keluarga atau seseorang makan hanya maksimal dua kali sehari dengan lauk pauk yang kurang bergizi, maka dapat dimasukkan dalam kategori miskin. Bila seseorang atau keluarga jarang menunaikan ibadah karena waktunya tersita untuk mencari penghasilan, misalnya maka mereka dapat dikatakan miskin. Terakhir, apabila seseorang atau suatu keluarga jarang mendapatkan pelayanan kesehatan dari tenaga medis karena tidak mampu menjangkau biaya pelayanan kesehatan, maka mereka dapat dikategorikan miskin.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Blora tercatat 92.840 jiwa atau 11,05 persen dari total 840.184 jiwa penduduk Kabupaten Blora di tahun 2004. Jumlah penduduk miskin Kecamatan Cepu tercatat 11.735 jiwa atau 15,67 persen dari total 74.889 jiwa penduduk Kecamatan Cepu di tahun 2004. Jumlah penduduk miskin Kelurahan Cepu tercatat 2.836

jiwa atau 17,56 persen dari total 16.145 jiwa penduduk Kelurahan Cepu di tahun 2004. (BPS:2005).

Jumlah penduduk miskin Kelurahan Cepu untuk tahun 2002 hingga 2004 mengalami perkembangan. Tahun 2002 ke tahun 2003 terjadi peningkatan jumlah keluarga miskin, antara lain disebabkan penambahan jumlah rumah pemukiman oleh penduduk dan kondisi perumahannya masuk ke dalam kategori keluarga miskin. Tahun 2003 ke tahun 2004 terjadi penurunan jumlah keluarga miskin, antara lain disebabkan beberapa program pengentasan kemiskinan telah berjalan dan kondisi ekonomi secara umum mengalami peningkatan. Lihat tabel 1.

Tabel I.1  
Jumlah penduduk miskin Kelurahan Cepu Th. 2002-2004

TAHUN	KATEGORI KK		JUMLAH	
	Miskin sekali	Miskin	KK	JIWA
2002	307	373	680	2.679
2003	312	381	693	2.979
2004	314	376	690	2.836

Sumber : Kelurahan Cepu, 2005

Berbagai program/proyek penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi kemiskinan secara menyeluruh di tingkat masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pada tahun 1999 pemerintah telah menggulirkan Proyek Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (Urban Poverty Project). Proyek ini diharapkan mempunyai strategi dan orientasi yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan institusi lokal. Kedua hal itu dinilai merupakan syarat menuju terbentuknya masyarakat yang mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapinya secara berkelanjutan. Proyek ini menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan dengan intensitas keterlibatan sampai pada tingkat pengambilan keputusan.

Posisi penduduk miskin di sekitar garis kemiskinan (near poor) amat rentan terhadap berbagai gejolak ekonomi, sosial maupun fisik, meningkatnya inflasi, panjangnya musim kemarau atau adanya ledakan hama yang akan mudah menenggelamkan kembali penduduk miskin tersebut dalam tingkat hidup di bawah garis kemiskinan.

Krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan lonjakan angka kemiskinan di perdesaan dan perkotaan. Namun pada sisi lain krisis itu juga telah menyadarkan kita bahwa pendekatan yang dipilih dalam penanggulangan kemiskinan perlu diperkaya dengan upaya untuk mengokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan

kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Masalah kemiskinan selalu menjadi ancaman yang sewaktu-waktu dapat meledak, seperti bom waktu. Permasalahan yang substansial adalah masihkah keberpihakan pemerintah kepada kemiskinan merupakan moralitas yang dikedepankan?. Seperti bantuan kepada masyarakat miskin yang telah dilakukan oleh pemerintah baik pada masa Orde Baru, masa pemerintahan BJ. Habibie, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan Megawati dan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang berjalan saat ini dan menjadi isu yang hangat karena diawali dengan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tetapi masyarakat miskin masih saja terus berteriak bahwa bantuan pemerintah masih sangat kurang, bantuan pemerintah untuk masyarakat miskin hanya bersifat politis, bukan kebijakan yang menyentuh substansi kebutuhan masyarakat miskin. Padahal dari pihak pemberi bantuan beranggapan bahwa bantuan yang diberikan sudah cukup bahkan berlebih.

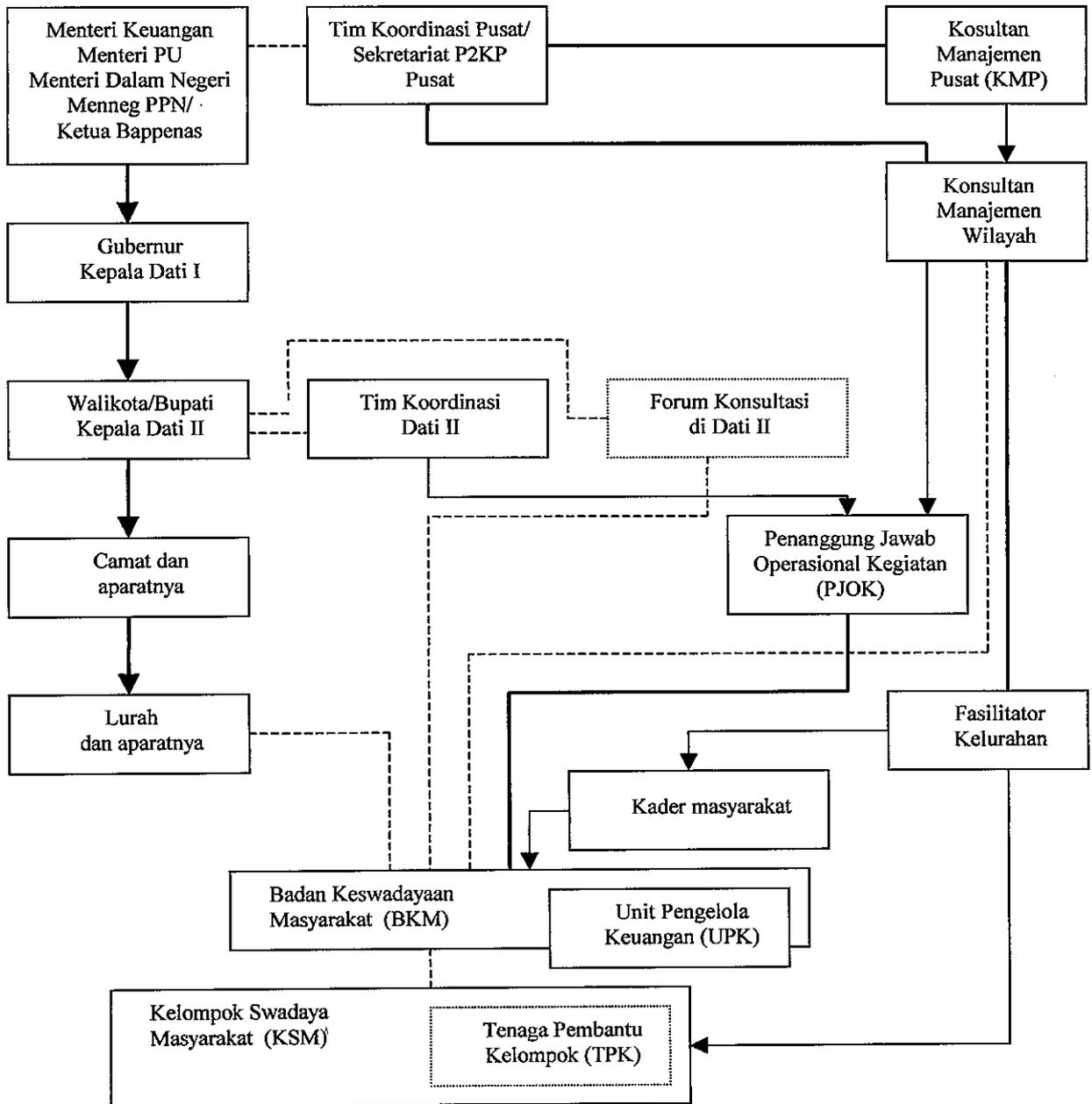
Program penanggulangan kemiskinan saat ini dimaksudkan untuk mendukung lebih lanjut program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan seperti IDT (Inpres Desa Tertinggal) atau yang baru berjalan seperti PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang

sasarannya di perdesaan, dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). Program yang telah dilaksanakan di perkotaan ini menganut *empowerment approach* sebagai salah satu syarat menuju *sustainable development*.

Salah satu program yang sekarang ini telah dilaksanakan dan masih dalam proses penyelesaian adalah Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), yang berfungsi untuk penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perkotaan, pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat miskin kota melalui pengelolaan di tingkat Kelurahan.

Pelaksanaan P2KP melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan secara khusus dibentuk struktur organisasi pelaksana P2KP. Lembaga pemerintahan yang terlibat meliputi Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas. Pelaksana P2KP meliputi Tim Koordinasi Pusat/Sekretariat Pusat, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Manajemen Wilayah, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Fasilitator Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Alur yang jelas dalam Sistem Manajemen P2KP dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP



—————> Garis hubungan Komando/Struktural  
 —————> Garis hubungan koordinasi pelaksanaan, pembinaan, pendampingan  
 —————> Garis hubungan kontraktual  
 - - - - -> Garis hubungan kerja administrasi  
 [ ]> Unsur yang dianjurkan ada/dibentuk

UPK adalah bagian dari BKM, TPK adalah bagian dari KSM

Sumber : Tim Persiapan P2KP (1999)

P2KP dilaksanakan di setiap kelurahan di seluruh wilayah Indonesia secara keseluruhan dan bertahap. Pelaksanaan P2KP terbagi kedalam beberapa fase. P2KP fase I dimulai tahun 1999, untuk wilayah kabupaten Blora ditetapkan 3 (tiga) Kelurahan. Alokasi dananya sebesar Rp. 1.000.000.000,-, dengan perincian Kelurahan Cepu sebesar Rp. 500.000.000,- Kelurahan Balun Rp.250.000.000,- dan Kelurahan Jepon Rp. 250.000.000,-.

Tabel 1.2  
Alokasi Dana P2KP Tahun 1999 Kabupaten Blora

Kelurahan	Alokasi Dana
Cepu	500.000.000,00
Balun	250.000.000,00
Jepon	250.000.000,00
Jumlah	1.000.000.000,00

Sumber : Tim Koordinasi P2KP Kabupaten Blora, 2003

Perkembangan kegiatan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dalam kenyataannya terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam implementasi program yang dilaksanakan, antara lain: alokasi dana pinjaman yang seharusnya untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau kelompok sasaran tetapi pengurus turut memperoleh fasilitas pinjaman. Kewajiban mengembalikan angsuran pinjaman P2KP oleh KSM (kelompok sasaran) belum sepenuhnya dapat dipenuhi

dengan baik sebagai akibat kegagalan program di masa lalu sehingga asumsi mereka program ini sama dengan program sebelumnya.

Penyampaian informasi tentang pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) oleh pelaksana kepada KSM (kelompok sasaran) yang tidak transparan, hal ini nampak dari kegiatan-kegiatan pemilihan proyek, pembuatan kontrak dan keuangan. Pengembalian pinjaman yang sangat rendah,. Apabila ada laporan tentang penyelewengan cukup banyak, tetapi pada tahap penyelesaian masalah tersebut lambat sehingga pelanggaran yang dilakukan terkesan tidak ada sanksinya. Kurang kejelasan tentang prosedur, komunikasi internal antara sekretariat proyek program dan para konsultan masih tersendat, demikian juga untuk pembagian peranan dan tanggung jawab antara aparat pemerintah dan konsultan tidak jelas.

Perkembangan dana P2KP Kelurahan Cepu dalam tiga tahun terakhir (2002-2004) mengalami kenaikan. Lihat tabel 2.

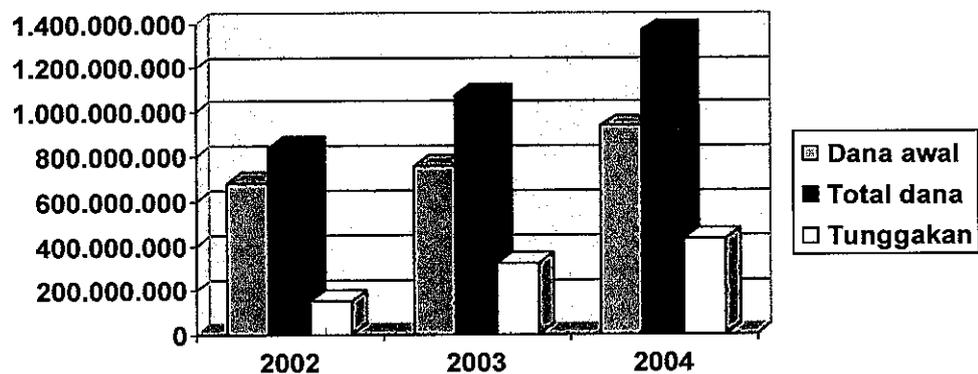
Tabel 1.3  
Perkembangan Dana P2KP Th. 2002-2004 Kelurahan Cepu

URAIAN	2002 (Rp)	2003 (Rp)	2004 (Rp)
Dana awal	685.278.953	758.511.483	938.821.926
Tunggakan	156.421.627	322.228.301	428.534.212
Total dana	841.700.580	1.080.739.784	1.367.356.138

Sumber : Tim Koordinasi P2KP Kelurahan Cepu, 2005

Dana awal P2KP di tahun 2002 Rp. 685.278.953,-, dengan jumlah tunggakan Rp.156.421.627,-. Tahun 2003, dana awal bertambah menjadi Rp.758.511.483,- dengan jumlah tunggakan juga bertambah menjadi Rp. 322.228.301,-. Tahun 2004 dana awal bertambah menjadi Rp. 938.821.926,- dengan jumlah tunggakan juga bertambah menjadi Rp. 428.534.212,-.Perkembangan dana P2KP yang digulirkan mengalami kenaikan tetapi hal tersebut diikuti pula dengan kenaikan jumlah tunggakan. Untuk lebih jelasnya dapat digambar grafik berikut.

Gambar 1.2  
Grafik Perkembangan Dana P2KP Kelurahan Cepu



Sumber : Tim Koordinasi P2KP Kelurahan Cepu, 2005

Dana awal P2KP yang digulirkan di tahun 2002 menyisakan tunggakan Rp. Rp.156.421.627,- atau 18,58 persen, bertambah menjadi Rp. 322.228.301,- atau 29,81 persen di tahun 2003 dan puncaknya tunggakan di tahun 2004 menjadi Rp. 428.534.212,- atau 31,13 persen.

Adanya tunggakan-tunggakan P2KP yang terjadi di Kelurahan Cepu mengakibatkan perguliran pada tahap-tahap berikutnya menjadi tidak maksimal. Mengapa hal ini terjadi? Seharusnya Pemerintah Kabupaten mengetahui permasalahan yang sebenarnya sehingga dapat dibuat kebijakan-kebijakan untuk memperbaiki program yang sudah ada dan dapat mengurangi faktor-faktor penghambat program.

Kondisi yang dijelaskan diatas menunjukkan bahwa implementasi kebijakan P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora kurang berhasil. Terdapat beberapa indikator-indikator atau gejala-gejala sebagai bukti empiris yang dapat dilihat dan dirasakan, diantaranya :

1. Kemampuan organisasi pengelola P2KP Kelurahan Cepu yang rendah dalam menjalankan program

Organisasi pengelola P2KP kurang mengoptimalkan perguliran dana pinjaman kepada KSM (kelompok sasaran) sehingga jumlah tunggakan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah tunggakan yang bertambah tersebut mengurangi jumlah dana yang digulirkan kepada KSM pada tahun selanjutnya.

2. Pengawasan belum berorientasi kepada tujuan P2KP

Organisasi pengelola P2KP memberikan dana bergulir kepada keluarga miskin (kelompok sasaran) tidak diikuti dengan pengawasan yang baik. Dana pinjaman tersebut diberikan kepada keluarga miskin untuk usaha produktif tetapi pada kenyataannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif sehingga pada saat tiba kewajiban untuk membayar angsuran akan mengalami kesulitan. Tujuan P2KP untuk memberdayakan ekonomi keluarga miskin tidak dapat tercapai.

3. Keluarga miskin (kelompok sasaran) di Kelurahan Cepu belum memahami P2KP yang sedang dilaksanakan.

Keluarga miskin (kelompok sasaran) menganggap bahwa P2KP di Kelurahan Cepu sebagai proyek/program pembangunan yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan tidak berkaitan langsung dengan mereka. Pengelola P2KP Kelurahan Cepu beranggapan sebaliknya bahwa keluarga miskin telah memahami P2KP yang tengah dilaksanakan melalui sosialisasi yang telah dilaksanakan.

4. Kurang adanya keadilan pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan oleh KSM

Apabila ada laporan tentang penyelewengan seperti angsuran pinjaman yang tidak tepat waktu, keanggotaan KSM yang tidak

sesuai ketentuan (bukan termasuk keluarga miskin), pada tahap penyelesaian masalah tersebut lambat sehingga pelanggaran yang dilakukan terkesan tidak ada sanksinya. Hubungan yang bersifat pribadi antara KSM bermasalah tersebut dengan pengurus P2KP lebih menentukan dalam penyelesaian masalah tersebut.

5. Terjadi saling lempar tanggung jawab antara pelaksana P2KP dengan Pemerintah Kelurahan apabila terjadi permasalahan

Penentuan KSM dan keanggotaannya menjadi tanggung jawab pelaksana P2KP tetapi apabila terjadi keberatan dari sebagian keluarga miskin yang tidak termasuk kedalam KSM maka pelaksana P2KP akan menyerahkan permasalahan kepada pemerintah kelurahan. Hal tersebut terjadi karena pada saat pembentukan KSM dan penambahan KSM baru oleh pelaksana P2KP, pihak Pemerintah Kelurahan tidak dilibatkan.

Berdasarkan deskripsi permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan, dengan judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BLORA (Studi Kasus Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan/P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora).**

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Implementasi kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program, diakibatkan oleh banyak faktor yang menjadi penyebabnya:

### **1. Kemampuan organisasi**

Ada beberapa permasalahan yang cukup mendasar di dalam kemampuan organisasi, misalnya kemampuan organisasi untuk menjalankan program, bersikap adil kepada keluarga miskin penerima manfaat P2KP dalam pemberian pinjaman, kemampuan untuk menggerakkan anggota organisasi, kemampuan organisasi untuk menciptakan kepercayaan dan kemampuan organisasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya.

### **2. Pengawasan**

Sebagai salah satu dari fungsi organik manajemen, pengawasan dihadapkan kepada beberapa permasalahan mendasar, misalnya apakah dalam pengawasan itu sudah berorientasi kepada tujuan organisasi, sudah obyektif dan jujur, sudah dilakukan secara kontinyu, sudah berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan yang ada dan sudah bersih dari kolusi.

### 3. Komunikasi

Di dalam menyampaikan program dan melaksanakannya komunikasi berperan penting, namun pada kenyataannya implementasi kebijakan bermasalah pada komunikasinya. Pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik dan mendapatkan umpan balik tidak sesuai yang diharapkan.

Permasalahan yang ada disekitar implementasi kebijakan P2KP tersebut adalah :

1. Apakah kurang berhasilnya implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan organisasi?
2. Apakah kurang berhasilnya implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh kurang intensifnya pengawasan?
3. Apakah kurang berhasilnya implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh kurang lancarnya komunikasi?
4. Apakah kurang berhasilnya implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh kurangnya kemampuan organisasi, kurang intensifnya pengawasan dan kurang lancarnya komunikasi secara bersama-sama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian : implementasi kebijakan, kemampuan organisasi, pengawasan dan komunikasi.
2. Untuk menguji hubungan antar variabel penelitian.
3. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kebijakan program penanggulangan kemiskinan secara khusus pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
2. Bagi lembaga terkait, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kemajuan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan tahap selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

“Teori secara umum diartikan sebagai rangkaian konsep, definisi, proposisi yang secara sistematis mampu melahirkan cara pandang terhadap suatu fenomena” .(Imawan, 1999:3). Selanjutnya teori dibentuk secara *induktif*, karena sifat induktif inilah maka ketetapan penjelasan suatu teori dapat berfungsi secara maksimal. Tegasnya teori dapat dioperasikan secara maksimal untuk menjelaskan suatu fenomena yang muncul dalam masyarakat.

Dalam konsep analisis sistem kebijakan publik, fenomena yang muncul dapat dilihat dari tingkat kapabilitas sistem politik yang juga sangat ditentukan oleh kapabilitas lembaga politik dan pemerintah (birokrasi) dalam menjalankan fungsi-fungsi artikulasi, agregasi, konvensi dan fungsi kebijaksanaan. Sebagai organisasi publik, pemerintah berkewajiban menjalankan berbagai fungsi administrasi dan manajemen. Empat fungsi pokok yang mendasar meliputi : fungsi perumusan dan penetapan kebijakan negara dan atau pemerintah, fungsi kepemimpinan, pengawasan dan koordinasi.

Di dalam memahami implementasi kebijakan maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari kebijakan atau kebijakan publik, kemudian pengertian implementasi kebijakan. Selanjutnya secara konseptual pengertian implementasi kebijakan dapat dioperasionalkan secara utuh.

### **1. Kebijakan publik**

Kebijakan menurut **James E. Anderson** dalam **Islamy (2001:17)**: *“A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or a matter of concern”* ( serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Batasan mengenai kebijakan publik juga disampaikan oleh

**Carl Frederich** dalam **Wahab (2001:3)**:

Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pakar lain juga mengemukakan pendapatnya seperti **George**

**C. Edwards III dan Ira Sharkansky** dalam **Islamy (2001:18-19)**:

“Kebijakan negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah.” Kebijakan negara tersebut dapat berupa

peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Adapun menurut **Islamy (2001:20)**: "Kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat."

Kebijakan yang diambil menjadi tidak mempunyai arti jika tanpa unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dapat dipatuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat Easton mendefinisikan kebijakan sebagai "*the authoritative allocation of values for the whole society*" (**Islamy, 2001:19**), yang mengandung arti bahwa kebijakan tersebut mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan kepada masyarakat.

Mengacu pada pendapat para ahli (James E. Anderson, Carl Frederich, George C. Edwards III, Islamy) maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga

memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung dari dukungan faktor-faktor yang mempengaruhi proses kebijakan tersebut.

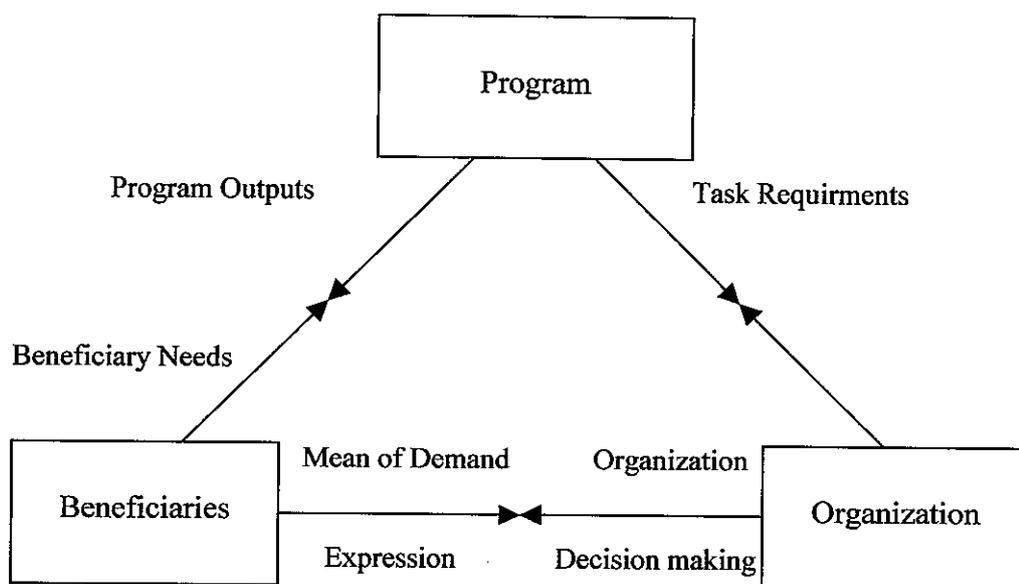
## **2. Implementasi Kebijakan**

**Menurut Grindle dalam Samodra (1994:22-24):**  
“implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Sedangkan konteks kebijakan akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan, konteks kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor terlibat.

Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada para pelaku yang mempunyai peranan di dalam kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu program maka model kesesuaian **D.C Korten dalam Tjokrowinoto (1996:136)** merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program/kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan

sasaran, syarat tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran. Keterkaitan antara elemen-elemen dalam pelebagaan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar II.1  
Teori Pelebagaan Program D.C. Korten



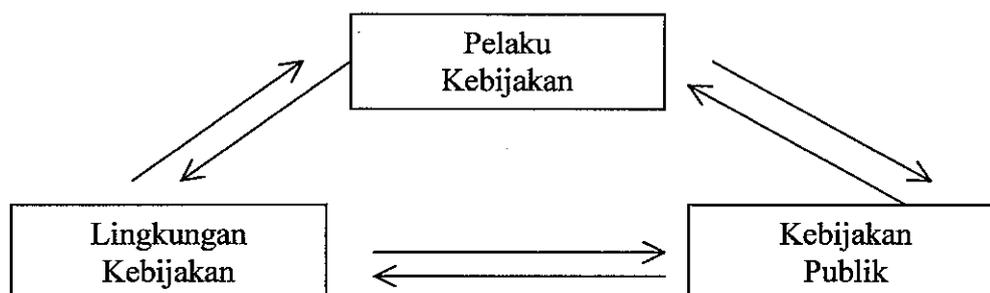
Sumber : Tjokrowinoto (1996:136)

Di dalam gambar terlihat bahwa organisasi sebagai salah satu fokus penelitian harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan pelbagai sumber dan memobilisasikan untuk dapat

memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga output program akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk memahami kebijakan publik banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pada hakekatnya kebijakan publik berada dalam suatu sistem, dimana kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik antara ketiga elemen yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Berikut ini skema tiga elemen sebagaimana yang digambarkan **Dunn (2003:44)**

Gambar II.2  
Tiga Elemen Sistem Kebijakan menurut W. Dunn



Sumber : W. Dunn (2003:44)

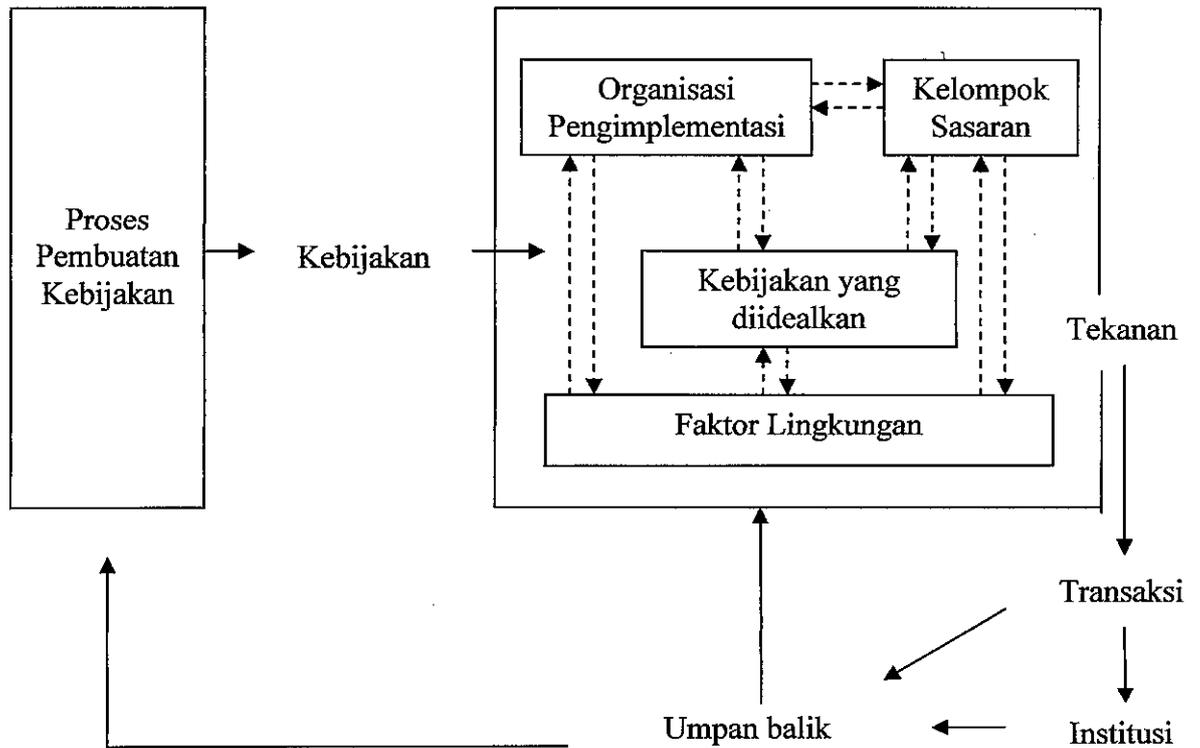
Tampak bahwa kebijakan merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh pejabat pemerintah dan diformulasikan ke dalam berbagai masalah (isu) yang timbul, sedangkan pelaku kebijakan adalah para individu atau kelompok

individu yang mempunyai peran yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi kebijakan.

Dari pendapat tersebut maka mekanisme kebijakan menunjukkan adanya keterpengaruhan antara pelaku kebijakan, kebijakan itu sendiri dan lingkungan kebijakan.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh **Quade (1984:310)**: bahwa dalam proses implementasi kebijakan akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan faktor-faktor lingkungan yang mengarah pada konflik, sehingga membutuhkan suatu transaksi sebagai umpan balik yang digunakan oleh pengambil keputusan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan . Proses implementasi kebijakan ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar II.3  
Model Implementasi Menurut E.S Quade

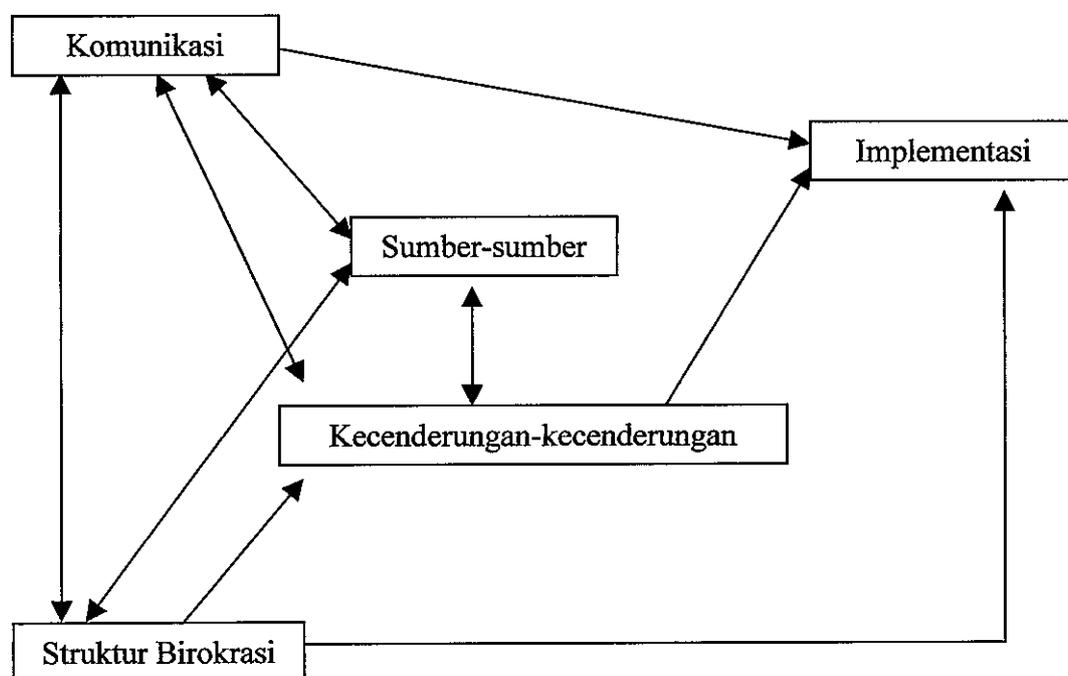


Sumber : E.S Quade (1984:311)

Senada dengan pendapat sebelumnya, bahwa kebijakan selalu dipengaruhi oleh beberapa variabel dasar. Menurut **George C. Edwards III** dalam **Winarno (1998:118)**: “faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber (sumber daya), kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi.” Selanjutnya “implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu

kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi permasalahan yang timbul meskipun telah diimplementasikan, akan mengalami kegagalan. Interaksi keterpengaruhan dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar II.4  
Model Implementasi Menurut G.C Edwards III



Sumber : George C. Edwards III (1980:148)

Dari gambar tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijakan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat bawahnya;

- b) Variabel struktur organisasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan;
- c) Variabel sumber-sumber, yang dimaksud disini adalah sumber daya yang mencakup manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan;
- d) Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana, bisa berupa sikap positif dalam bentuk memberikan dukungan atau sikap negatif dalam bentuk apatis.

Implementasi kebijakan publik menurut Winarno (1998:72):

Model proses implementasi terdapat 6 (enam) variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Variabel-variabel tersebut merupakan variabel bebas dan variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya, adapun keenam variabel tersebut adalah (1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, (2) Sumber-sumber, (3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana, (4) Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana, (5) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik, (6) Kecenderungan pelaksana-pelaksana.

Jadi dalam implementasi kebijakan terdapat variabel-variabel yang saling berhubungan membentuk kaitan antara kebijakan publik dan pencapaian yang diharapkan.

**Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam**

**Wahab (2001:65):**

Mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya suatu kebijakan, baik menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat.

Konsep mengenai implementasi **menurut kamus Webster dalam Wahab (1997:64):** berasal dari kata *to implement* (mengimplementasikan) yang juga berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu), termasuk tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan .

Senada dengan pendapat sebelumnya, bahwa variabel organisasi pengimplementasi akan mempengaruhi kebijakan yang ada, dalam implementasi kebijakan sebenarnya disadari bahwa tidak semua alternatif secara komprehensif dapat mengatasi semua permasalahan yang muncul. **Menurut Widaningrum dalam Samodra (1994:17):** “bahwa tidak setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah dapat dijalankan dengan baik dan membuahkan hasil yang diharapkan.”

Disebutkan pula tentang tekanan dari berbagai pihak dalam hal ini dapat dikatakan juga mengenai pengawasan, yang dilakukan dalam implementasi kebijakan. Namun pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh **Henry Fayol** dalam **Lubis (1988:25)**:

...dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjuk atau menemukan kelemahan-kelemahan itu...

Pengawasan secara efektif dalam implementasi kebijakan sangat penting dilakukan. Apabila fungsi pengawasan terhadap program yang sedang dilaksanakan baik maka akan semakin baik pula hasil yang diperoleh dan tercapai tujuan program.

Mengacu dari berbagai pendapat para ahli yang telah disampaikan di atas maka penulis akan mengadopsi pendapat dari Grindle, David C. Korten, George C. Edward III dan E.S Quade dalam melaksanakan kajian tentang masalah implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa yang menjadi penyebab tidak berjalannya kebijakan Penanggulangan Kemiskinan khususnya Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan secara efektif (Y) adalah adanya faktor-faktor atau variabel-

variabel yang mempengaruhi yaitu variabel kemampuan organisasi (E.S Quade), variabel pengawasan (tekanan dalam E.S Quade) dan variabel komunikasi (George C. Edward III ) sebagai variabel (X1), (X2), dan (X3).

### **3. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan**

Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor yang menentukan keberhasilannya. Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan, dalam hal ini P2KP adalah sebagai berikut :

#### **a. Kemampuan Organisasi**

Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan para pelaku kebijakan. Menurut Grindle dalam Samodra (1994:22): “implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan. Sedangkan konteks kebijakan akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan, konteks kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor terlibat.

Teori pelebagaan DC. Korten menyebutkan *organization* sebagai variabel yang menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu program disamping variabel *program* dan *beneficiaries* . Organisasi yang dimaksud mempunyai fungsi untuk pengorganisasian dan pembuatan keputusan sebagai bentuk interaksinya terhadap tuntutan kebutuhan dan lingkungannya. (Gb.II.1).

Tiga elemen sistem kebijakan menurut W. Dunn menyebutkan bahwa kebijakan publik berada dalam satu sistem, diantaranya pelaku kebijakan. Secara berturut-turut tiga elemen yang dimaksud adalah : lingkungan kebijakan, pelaku kebijakan dan kebijakan publik (Gb.II.2). Pelaku kebijakan yang dimaksud dituntut memiliki kemampuan dalam menjalankan suatu program.

Model implementasi kebijakan menurut ES.Quade menyebutkan bahwa terjadi interaksi antara organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan faktor-faktor lingkungan dalam menjalankan kebijakan yang diidealkan. (Gb.II.3).

Dalam kehidupan organisasi agar dapat berjalan maka organisasi tersebut dituntut memiliki kemampuan menjalankannya. Dalam hal ini terutama para penyusun

organisasi di dalamnya. Istilah-istilah “kemampuan” biasanya menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan. Menurut Moenir (1985:76): “Kemampuan ialah suatu keadaan pada seseorang yang secara penuh kesungguhan, berdaya guna, dan berhasil guna melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal”.

Pendapat Ken Blanchard dalam Agus Dharma (1986:87): menyebutkan bahwa “Kematangan pekerjaan dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu, hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan”. Pengetahuan dan keterampilan dijelaskan oleh Thoha (2002:316): “Kemampuan yang merupakan salah satu unsur kematangan, berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh oleh pendidikan dan pelatihan dan atau pengalaman”.

Mencermati berbagai pendapat mengenai kemampuan maka dapat dilihat bahwa kemampuan merupakan sesuatu yang menunjukkan tingkat kematangan yang dimiliki yang berasal dari pendidikan, keterampilan atau pengalaman yang diperoleh seseorang dalam proses pelaksanaan tugas organisasi.

### **1) Sumber daya organisasi**

Dalam suatu organisasi, unsur sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting, baik dalam peranannya

sebagai perencana maupun pelaksana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan pemilihan sumber daya manusia yang tepat maka program akan dapat berjalan lancar seperti yang diharapkan. Namun perlu diingat bahwa sangatlah sulit dan kompleks dalam mengatur sumber daya manusia, sebab manusia mempunyai pikiran, perasaan, status keinginan, latar belakang sosial budaya, dan sebagainya.

Pengelolaan terhadap sumber daya manusia yang ada diperlukan manajemen yang disebut dengan manajemen sumberdaya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan, praktek, dan sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap dan prestasi karyawan. Lebih jauh lagi bahwa tantangan yang dihadapi di masa datang mengharuskan organisasi untuk berkonsentrasi pada bidang sumber daya manusia. Tantangan yang dimaksud adalah *global challenge*, memenuhi kebutuhan *stake holder* dan tantangan sistem kerja yang canggih.

Inti dari manajemen sumberdaya manusia adalah pengelolaan orang dalam organisasi secara optimal agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan meningkat sebagaimana yang diharapkan. Manajemen

sumberdaya manusia juga merupakan suatu pengakuan akan pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang potensial dan perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan efek yang optimal terhadap kinerja organisasi **(Bernardin dan Russel, 1998:2-3)**.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa manajemen sumberdaya manusia adalah suatu upaya untuk mengelola dan mendayagunakan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh organisasi pemerintah (pelaku program penanggulangan kemiskinan di perkotaan) sebagai suatu aset dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Mengelola disini tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi, seperti pemberian insentif, operasional kegiatan, pelatihan dan pengembangan tetapi sangat kompleks menyangkut perencanaan, rekrutmen, kompensasi, dan bagaimana menciptakan manusia pembelajar yang senantiasa memiliki keinginan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam upaya untuk melancarkan pelaksanaan tugasnya.

## **2) Struktur Organisasi**

Pengertian organisasi menurut **James.D. Money** dalam **Sarwoto (1988:13)**: *"The form every human*

*association for attainment or common purpose*" (bentuk setiap kerjasama manusia untuk pencapaian tujuan bersama)".

Pendapat lain tentang organisasi yang senada dikemukakan oleh **Sitanggang (1986:135)**:

Suatu tuntutan hubungan kerjasama antara orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengadakan pembagian tugas dan pembatasan tanggung jawab. Suatu organisasi disebut baik bila semua struktural fungsional berjalan dengan baik yakni dapat melakukan tugas hubungan interaksi dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dimiliki dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Hal yang cukup menarik tentang organisasi yang dikemukakan **Stephen P. Robbins** dalam **Ndraha (1999:41)**: *a consciously coordinated social, entity, with a reality very identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals.* (adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan).

Dengan demikian dapat dikatakan organisasi itu merupakan suatu kesatuan dari sekelompok orang yang bekerja sama secara sistematis dan terus menerus dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, serta harus mampu memberikan kepuasan kepada anggotanya. Agar dalam

bekerja sama di dalam organisasi tersebut mereka merasa dibutuhkan oleh organisasi, dan secara maksimal mereka diberdayakan sehingga akan diperoleh implementasi kebijakan sesuai dengan harapan, secara lebih khusus pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

#### **b. Pengawasan**

Pengawasan secara efektif dalam implementasi kebijakan sangat penting dilakukan, sebab keberhasilan fungsi pengawasan dalam program yang sedang dilaksanakan akan mempengaruhi keberhasilan program sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Tiga elemen sistem kebijakan menurut W. Dunn menyebutkan bahwa kebijakan publik berada dalam satu sistem, diantaranya lingkungan kebijakan. Secara berturut-turut tiga elemen yang dimaksud adalah : lingkungan kebijakan, pelaku kebijakan dan kebijakan publik (Gb. II.2). Lingkungan kebijakan yang dimaksud adalah lingkungan yang mendukung dalam menjalankan suatu program, pencapaian lingkungan yang dimaksud diupayakan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Model implementasi menurut ES. Quade menyebutkan faktor tekanan untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang diharapkan, lingkungan dimana organisasi pengimplementasi menjalankan kebijakan yang diidealkan kepada kelompok sasaran (Gb. II.3).

Pengawasan sering diartikan sebagai suatu kondisi seseorang pemimpin atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya memantau kegiatan yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Namun pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh **Henry Fayol** dalam **Lubis (1988:2-5)**:

...dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjuk atau menemukan kelemahan-kelemahan itu...

Adapun pengawasan dari sisi proses, menurut **Sondang P. Siagian** dalam **Silalahi (1999:172)**: “ proses pengamatan dari keseluruhan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan”. Dalam pengertian ini berarti kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan-

penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan.

Hal yang tidak boleh terlupa pengawasan pada dasarnya terdiri dari suatu proses yang dibentuk oleh tiga hal yang bersifat universal, menurut Winardi (1983:81):

**1) Penetapan standard**

Tolok ukur ini diperlukan untuk dapat membandingkan dan menilai apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana, pedoman, kebijaksanaan serta peraturan perundangan.

**2) Pengukuran hasil kerja**

Pengukuran pelaksanaan dan perbandingan tersebut merupakan kegiatan penilaian terhadap hasil yang nyata-nyata dicapai melalui perbandingan terhadap apa yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan.

**3) Pelaksanaan tindakan perbaikan**

Tindak lanjut ini dilakukan berdasarkan hasil penilaian dan pembenahannya setelah mengukur pelaksanaannya dan membandingkan. Langkah tindak lanjut ini dapat berupa

penyesuaian mengenai rencananya dan atau kebijakannya dan atau ketentuan-ketentuannya, memberikan bimbingan, penghargaan dan sanksi.

### **c. Komunikasi**

Model implementasi menurut G.C. Edwards III mensyaratkan terdapat variabel komunikasi, struktur birokrasi, implemementasi, sumber-sumber dan adanya kecenderungan-kecenderungan yang semuanya saling berinteraksi dalam satu sistem (Gb. II.4).

Komunikasi berperan dan berpengaruh terhadap kegiatan organisasi, dengan komunikasi yang efektif maka tujuan organisasi akan dapat dicapai secara maksimal. “Dalam kehidupan organisasi pencapaian tujuan dengan segala proses remifikasinya membutuhkan komunikasi yang efektif”. (Siagian, 1986:9).

Dikatakan juga bahwa “Komunikasi adalah pentransferan dan pemahaman makna” (Robin, 2001:31). “Komunikasi dapat dipandang sebagai proses pengiriman dan penerimaan lambang-lambang tersebut” (Ron Ludlow dan Fergus Panton, 2000:7).

**Pendapat Thoha (2002:153) :**

Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi diwujudkan melalui lambang-lambang tertentu. Lambang-lambang ini diperkirakan dapat menggugah dan merangsang indera orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Indera orang yang menjadi sasaran lambang ini ialah indera penglihatan dan pendengaran. Simbol-simbol atau lambang dalam komunikasi tersebut pada umumnya berupa kata-kata, gambar-gambar, dan mata, mengangkat alis dan lain sebagainya.

Komunikasi merupakan suatu proses sosial yang mempunyai relevansi terluas di dalam memfungsikan setiap kelompok, organisasi atau masyarakat.

**1) Dimensi Komunikasi**

Proses komunikasi organisasi terikat dalam struktur formal yang pada hakekatnya dapat dibedakan menjadi tiga dimensi, **Thoha (2002:164):**

1. Dimensi vertikal, adalah dimensi komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah, dan sebaliknya dari bawah ke atas, seperti yang tergambar dalam susunan organisasi yang melukiskan hubungan kerja antara atasan dan bawahan ;
2. Dimensi horisontal, yakni pengiriman dan penerimaan berita atau informasi yang dilakukan antara berbagai pejabat yang mempunyai kedudukan sama. Tujuan dari komunikasi ini untuk melakukan koordinasi. Komunikasi yang berdimensi horisontal ini sebagian dapat dilakukan dengan tertulis dan sebagian lain dilakukan secara lisan;

3. Dimensi luar organisasi, dimensi komunikasi ini timbul sebagai akibat dari kenyataan bahwa suatu organisasi tidak bisa hidup sendirian. Ia merupakan bagian dari lingkungannya. Karena itu organisasi membutuhkan berbicara atau berkomunikasi dengan pihak luar yang berada dalam lingkungannya tersebut.

## 2) Saluran komunikasi

Salah satu hal yang penting dalam organisasi adalah komunikasi, karena organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang selalu membutuhkan komunikasi di dalamnya. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat terjadi karena terdapat hambatan-hambatan. "Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan *frame of reference*, yakni panduan pengalaman dan pengertian (collection of experiences and meaning) yang pernah diperoleh komunikan" **Wilbur Schramm** dalam (Effendy, 1997:13). Komunikasi yang baik membutuhkan saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan.

Dari beberapa pendapat tersebut, komunikasi di sini diartikan sebagai proses untuk menyalurkan informasi antar individu baik yang dilakukan dalam organisasi formal maupun informal sesuai kepentingan masing-masing sehingga maksud dan tujuan organisasi dapat dimengerti oleh anggotanya. Keberhasilan komunikasi dalam organisasi dapat

dimengerti oleh anggotanya. Keberhasilan dalam organisasi ditentukan oleh indikatornya, yaitu sifat komunikasi, dimensi komunikasi, kualitas komunikasi dan persepsi (sesuatu hal yang cukup mempengaruhi dalam perumusan kebijakan publik yaitu faktor komunikasi).

### **3) Umpan balik**

“Umpan balik merupakan pengecekan akhir apakah komunikasi dapat diterima atau tidak”(Robin, 2001:313). Selanjutnya “umpan balik dapat diukur sejauh mana komunikasi dua arah dipahami pada hasil akhir “, Joseph A.De Vito dalam (Thoha, 2002:166-168). Komunikasi akan efektif jika mendapat dukungan orang-orang terkait dalam organisasi sehingga akan mempengaruhi kualitas komunikasi, artinya jika semakin tinggi dukungan akan meningkatkan kualitas komunikasi sehingga komunikasi akan berkembang, sebaliknya jika kurang mendapat dukungan maka kualitas komunikasi menjadi rendah dan komunikasi tidak berkembang.

## **B. Hubungan antar variabel**

Berdasarkan landasan teori yang ada maka dapat ditegaskan mengenai hubungan-hubungan antar variabel, yang kemudian digambarkan pula bangun teori untuk mendasari pelaksanaan penelitian.

## **1. Hubungan kemampuan organisasi dengan implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan**

P2KP di Kelurahan Cepu dilaksanakan oleh organisasi pelaksana P2KP Kelurahan Cepu yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) (Gb.I.1). BKM dituntut untuk menjalankan kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cepu secara efektif. Menurut Gibson et.al (1996:32): “Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas kelompok dan efektivitas individu”.

Organisasi terdiri dari kelompok dan individu; meski efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas kelompok dan individu tetapi efektivitas organisasi lebih dari sekedar penjumlahan efektivitas kelompok dan individu. Melalui efek sinergi, organisasi mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibanding penjumlahan bagian-bagiannya. Organisasi dapat melakukan lebih banyak pekerjaan dibanding bila mungkin dilakukan oleh upaya individual.

Kemampuan organisasi pelaksana P2KP yang diberdayakan dengan baik maka akan diperoleh implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan harapan.

## **2. Hubungan pengawasan dengan implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan**

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan memperbaiki jika ada kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan.

Dalam hubungannya dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, pengawasan disini dilakukan oleh semua pihak yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Pengawasan ini dapat dilakukan mulai dari masyarakat penerima manfaat, masyarakat secara umum, pelaksana program/pengelola dan tentunya dari pemberi dana (donatur). Dengan pengawasan ini diharapkan implementasi kebijakan dapat dilakukan secara baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

## **3. Hubungan komunikasi dengan implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan**

Komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses implementasi dan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Komunikasi yang baik atau yang sempurna adalah penyampaian informasi/pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang tersebut

dapat memahami dan mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut.

Komunikasi dapat dilaksanakan melalui saluran-saluran formal dan informal sesuai kebutuhan organisasi, umpan balik dapat diterima serta persamaan persepsi terhadap obyek tertentu. Melalui indikator tersebut akan dapat diukur sejauh mana komunikasi dalam antar organisasi dapat berjalan lancar.

Komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang harus ditaati dan dilaksanakan, sedangkan secara formal yaitu dengan musyawarah pembangunan, rapat sosialisasi baik oleh tim Kabupaten maupun dari konsultan di tiap-tiap wilayah.

#### **4. Hubungan kemampuan organisasi, pengawasan dan komunikasi dengan implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan**

Hubungan kemampuan organisasi dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tentunya dapat dikatakan bahwa dengan kemampuan organisasi yang maksimal diberdayakan

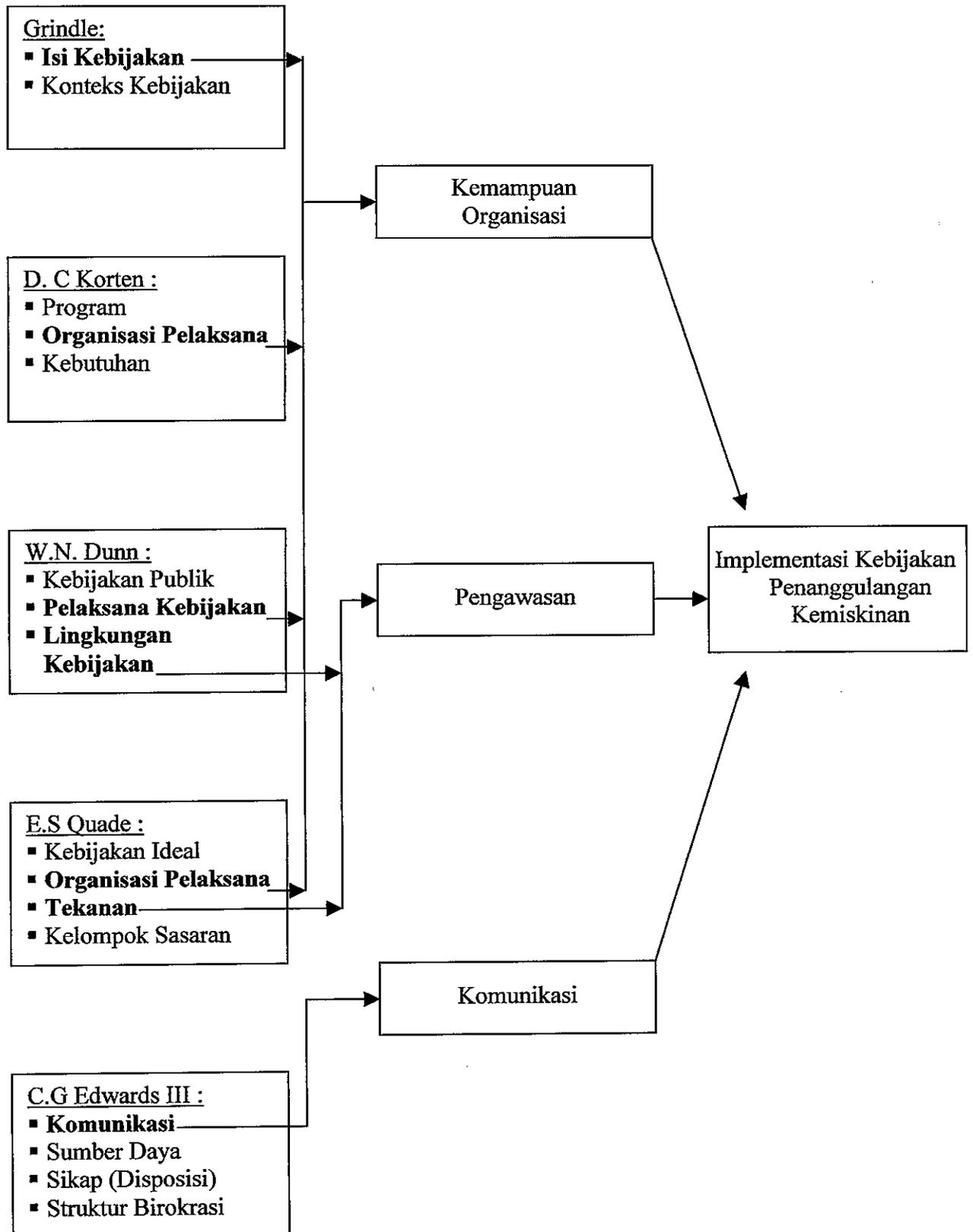
maka akan diperoleh implementasi kebijakan sesuai dengan harapan, secara lebih khusus pada P2KP.

Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan memperbaiki jika ada kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan. Dengan pengawasan ini diharapkan implementasi kebijakan dapat dilakukan secara baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah dengan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program penanggulangan kemiskinan di perkotaan yang harus ditaati dan dilaksanakan, sedangkan secara formal yaitu dengan musyawarah pembangunan, rapat sosialisasi baik oleh tim Kabupaten maupun dari konsultan di tiap-tiap wilayah.

Berdasarkan tinjauan pustaka mengenai kebijakan publik, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu kemampuan organisasi, pengawasan dan komunikasi serta hubungan antar variabel, maka dapat disusun bangun teori sebagai berikut.

Gambar II.5  
 Bangun Teori Penelitian  
 Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora



### C. Penelitian yang relevan

Dalam tesis ini, penulis berusaha meneliti masalah implementasi kebijakan publik sebagai variabel dependen. Adapun variabel independennya ada tiga yaitu : kemampuan organisasi, pengawasan dan komunikasi.

Melalui kajian pustaka, penulis menemukan penelitian yang relevan, yaitu penelitian tentang program-program pembangunan terutama yang berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Seminar nasional tekanan penduduk dan perubahan sosial ekonomi di pedesaan Jawa yang dilakukan oleh Universitas Nasional Australia dan P3PK-UGM tanggal 8-11 Juli 1985 (**Mubyarto dan Ari Basuki, 1989:23-24**).

Penelitian yang dipaparkan dalam seminar tersebut memilih 6 (enam) kabupaten masing-masing : Tegal, Grobogan, Kebumen, Purworejo (Jawa Tengah), Kediri dan Jember (Jawa Timur). Penelitian menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan historis. Keenam kabupaten yang diteliti itu ditemukan adanya keanekaragaman dalam susunan sosio-ekonomi dan pola reaksi masyarakat terhadap pertumbuhan jumlah penduduk. Diantara keenam Kabupaten tersebut ada yang mobilitas penduduknya mencolok, terutama Purworejo dan Tegal; ada yang mobilitas penduduknya rendah sekali termasuk

Grobogan yang tanahnya tidak subur; ada juga yang mobilitas penduduknya sedang, yaitu yang penduduknya kadang-kadang sebagian pergi ke luar daerah tetapi kemudian kembali ke kampung halaman.

Keanekaragaman dalam kegiatan sosio-ekonomi di suatu daerah merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi nasional dan internasional.

Penelitian lain yaitu mengenai studi implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang oleh V.W Novita Dewi di tahun 2003. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan fenomenologis, beberapa fenomena yang diamati yaitu : kemiskinan, pemberdayaan dan implementasi P2KP. Penelitian tersebut menemukan fakta bahwa kelompok sasaran P2KP di Kecamatan Semarang Utara mempunyai budaya yang fatalistik, sehingga kesesuaian fungsi antara program dan penerima bantuan, program dan organisasi pelaksana serta penerima bantuan, program dan organisasi pelaksana akan sulit terwujud.

Kesesuaian fungsi-fungsi yang dimaksud dapat ditingkatkan melalui upaya *role clarity*, yang harus dilaksanakan di lapangan secara konsisten.

#### **D. Hipotesis**

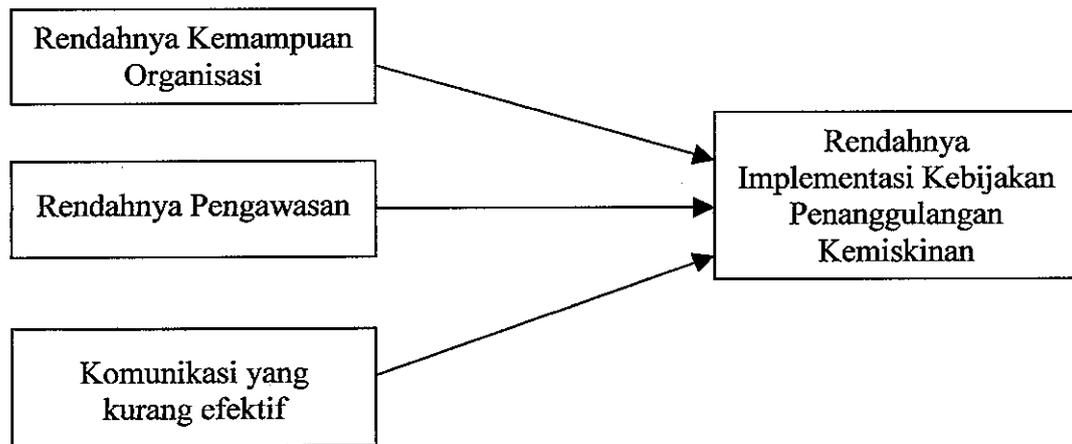
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian; atau dapat juga dikatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris.(Sugiyono, 2002:39).

Hipotesis-hipotesis alternatif dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

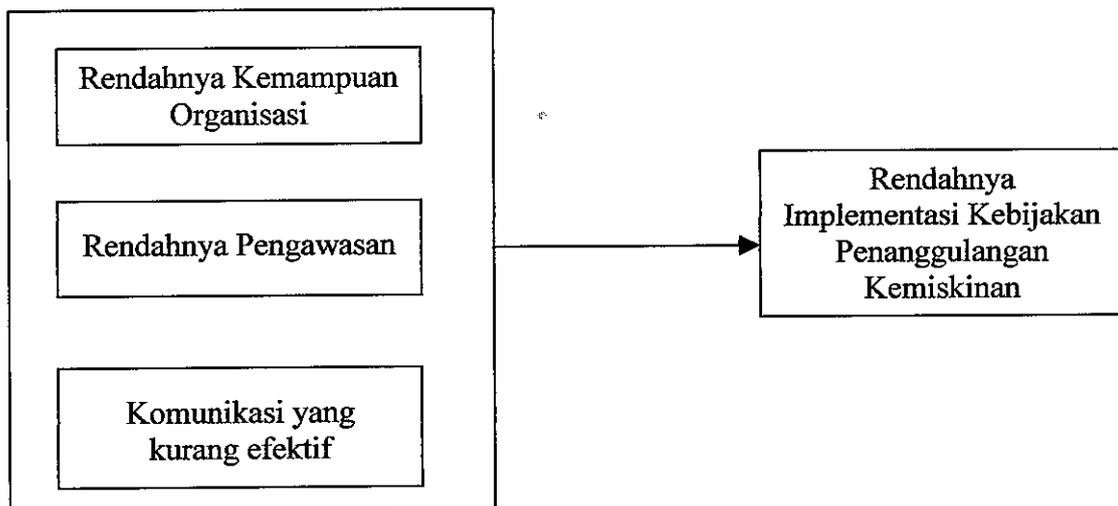
1. Ada hubungan positif dan signifikan antara rendahnya kemampuan organisasi dengan rendahnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;
2. Ada hubungan positif dan signifikan antara rendahnya pengawasan dengan rendahnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
3. Ada hubungan positif dan signifikan antara komunikasi yang kurang efektif dengan rendahnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;
4. Ada hubungan positif dan signifikan antara rendahnya kemampuan organisasi, rendahnya pengawasan dan komunikasi yang kurang efektif secara bersama-sama dengan rendahnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;

Gambar II.6  
Hubungan Antar Variabel

Hipotesis Minor



Hipotesis Mayor



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

“Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sedangkan cara ilmiah, berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan”.(Sugiyono, 2002:1).

**Dikemukakan oleh Singarimbun (1989:4-5) :**

Metode Penelitian survey dapat digunakan untuk maksud (1) penjajakan (eksploratif), (2) deskriptif, (3) penjelasan (explanatory atau confirmatory), yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, (4) evaluasi, (5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang, (6) penelitian operasional dan (7) pengembangan indikator-indikator sosial.

Penelitian untuk tesis ini, termasuk penelitian penjelasan (*explanatory research*), dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis.

Rancangan penelitian merupakan pedoman dan langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Rancangan penelitian juga berfungsi sebagai sarana untuk

mengantisipasi hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya penelitian (Sugiyono, 2002:197).

Suatu penelitian dilakukan bertitik tolak dari adanya suatu permasalahan, yang merupakan “penyimpangan” (deviasi) dari suatu standard. Masalah tersebut muncul pada tempat dan waktu tertentu, untuk itulah maka penelitian dilakukan pada tempat dan waktu tertentu serta untuk masalah tertentu.

Dalam penelitian terhadap implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora, penulis akan menggunakan rancangan penelitian kuantitatif. Data-data yang diperoleh dari lapangan akan didiskripsikan secara sistematis, terkstual dan akurat, sesuai dengan fakta-fakta, sifat-sifat, serta akan diteliti hubungan-hubungan antar variabel.

## **B. Ruang Lingkup**

Didalam penelitian ini ruang lingkup penelitian akan dibatasi pada masalah “Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora”.

Implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, namun karena keterbatasan waktu, dana, tenaga maupun teori maka agar penelitian ini dapat dilakukan secara lebih mendalam, untuk itu akan dibatasi pada varaibel-variabel: kemampuan

organisasi, pengawasan dan komunikasi yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terhadap implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Blora adalah di wilayah Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

### **D. Variabel Penelitian**

Dilihat dari hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, maka dalam penelitian ini penulis menetapkan : kemampuan organisasi, pengawasan dan komunikasi sebagai variabel independen, serta implementasi kebijakan sebagai variabel dependen.

#### **1. Definisi Konseptual**

“Definisi konseptual adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama” **Singarimbun (1989:34)**. Berdasarkan definisi tersebut, yang dimaksud definisi konseptual dalam penelitian ini adalah definisi-definisi konseptual dari :

- a. Implementasi Kebijakan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari pejabat-pejabat atau lembaga

di tingkat yang lebih rendah/daerah dalam upaya mengubah perilaku masyarakat/kelompok sasaran dari program yang bersangkutan. Apabila dalam pelaksanaan program tidak berjalan semestinya maka akan dilakukan upaya penyesuaian atau penganan sanksi tertentu terhadap pelaku-pelaku program atau kebijakan tersebut perlu dirumuskan kembali.

- b. Kemampuan organisasi adalah merupakan suatu yang menunjukkan tingkat kematangan yang dimiliki dari sekelompok orang yang bekerjasama secara sistematis dan terus menerus berasal dari pendidikan, keterampilan ataupun pengalaman yang diperoleh dalam proses pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, serta harus mampu memberikan kepuasan kepada anggotanya.
- c. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan memperbaiki jika ada kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan.
- d. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi secara timbal balik baik yang dilakukan antar individu maupun kelompok sehingga maksud dan tujuan yang disampaikan dapat dimengerti oleh semua pihak.

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang merupakan kenyataan dari pelaksanaan kebijakan P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, dimana keberhasilannya menurut **Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier** dalam **Wahab (2001:65)** dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :
  - 1) Konsistensi pelaksanaan program P2KP
  - 2) Manfaat program P2KP
  - 3) Dampak yang terjadi setelah program dilaksanakan.
- b. Kemampuan organisasi adalah tingkat kematangan yang dimiliki untuk diberdayakan secara maksimal. Dalam pelaksanaan kebijakan P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, menurut **Ken Blanchard** dalam **Agus Dharma (1986:87)** diukur melalui indikator sebagai berikut :
  - 1) Sumberdaya Organisasi
  - 2) Struktur Organisasi

c. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar program dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan kebijakan P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora **menurut Winardi (1983:81)** diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Penetapan standard
- 2) Pengukuran hasil kerja
- 3) Pelaksanaan tindakan perbaikan

d. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi secara timbal balik antara penerima manfaat, pelaksanaan program dan konsultan. Dalam pelaksanaan kebijakan P2KP di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, **menurut Thoha (2002:153)** diukur melalui indikator sebagai berikut :

- 1) Dimensi komunikasi
- 2) Saluran komunikasi
- 3) Umpan balik

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan penulis pada dasarnya digolongkan menjadi dua jenis, yaitu :

#### **a. Data Kuantitatif**

Yaitu data yang berupa angka-angka, skala-skala, tabel-tabel, formula dan sebagainya, yang sedikit banyak menggunakan perhitungan matematika, misalnya tentang jumlah sampel, skor variabel dan lain sebagainya.

#### **b. Data Kualitatif**

Yaitu data yang sulit diukur dengan angka atau ukuran-ukuran lain, misalnya : pendapat, sikap, tindakan dan lain sebagainya.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sumber :

#### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama. Termasuk sumber pertama adalah semua anggota kelompok sasaran P2KP, pengurus P2KP. Data primer dimaksud adalah keterangan-keterangan tentang aspek-aspek dari implementasi kebijakan, kemampuan organisasi, pengawasan maupun komunikasi.

## b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari selain sumber pertama, seperti : catatan-catatan, buku-buku, laporan-laporan, arsip-arsip, juklak-juknis dan lain sebagainya.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk pengukuran terhadap fenomena-fenomena sosial di dalam implementasi kebijakan. Alat ukur atau instrumen penelitian itu dibuat secara spesifik untuk variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan atau kuisisioner yang mengacu pada variabel independen maupun variabel dependen, yang telah dijabarkan ke dalam definisi operasional.

Dalam penelitian ini akan digunakan instrumen yang berupa daftar pertanyaan atau kuisisioner dengan skala pengukuran data , yaitu dengan memberikan nilai atau skor untuk jawaban yang diperoleh, dari pertanyaan paling rendah sampai pertanyaan paling tinggi. **Menurut Kinnear dalam Umar (2002:95):** “skala Likert berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu’. Responden diminta mengisi pernyataan dalam skala interval. Setiap item pertanyaan pada setiap variabel menggunakan skala pengukuran antara rentang skor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima). Skor ini bersifat membedakan dan

mengurutkan, tetapi tidak memberikan jarak yang bobotnya ditentukan berdasarkan bobot jawaban pertanyaan.

Pedoman untuk pengukurannya adalah, jika terdapat jawaban dengan bobot rendah, maka diberikan skor 1 (satu) dan seterusnya, sehingga jawaban dengan bobot tertinggi diberikan skor 5 (lima). Di dalam jawaban pertanyaan akan berlaku aturan dimana bobot skornya adalah :

5 (lima)

4(empat)

3(tiga)

2(dua)

1(satu)

Masing-masing jawaban akan digunakan kriteria sebagai berikut :

1. Kategori jawaban yang sangat mendukung, diberi skor 5 (lima)
2. Kategori jawaban yang mendukung, diberi skor 4 (empat)
3. Kategori jawaban bisa ya bisa tidak, diberi skor 3 (tiga)
4. Kategori jawaban yang kurang mendukung, diberi skor 2 (dua)
5. Kategori jawaban yang tidak mendukung, diberi skor 1 (satu).

Selanjutnya agar diperoleh hasil penelitian yang obyektif dan akurat, akan dilakukan pengujian validitas instrument penelitian dengan statistik.

### **G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisa yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang termasuk populasi adalah semua penerima manfaat P2KP yang terdiri dari anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan perorangan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. **Sugiyono (2002:57)**. Sampel penelitian ini adalah sebagian dari semua penerima manfaat P2KP Kelurahan Cepu yang terdiri dari anggota KSM dan perorangan. Sampel diambil dengan cara *random sampling*, artinya seluruh elemen penelitian mempunyai peluang yang sama untuk menjadi responden. **Menurut Roscoe dalam Sugiyono (2002:12)**, “...ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 500 (lima ratus)”. Juga dijelaskan oleh Roscoe, apabila dalam penelitian akan dilakukan analisis dengan *multivariate* (korelasi atau regresi ganda), maka jumlah sampel minimal sepuluh kali dari jumlah variabel yang diteliti.

Berdasarkan pandangan Roscoe tersebut, maka besarnya sampel yang akan diteliti sebanyak 40 (10 kali jumlah variabel yang diteliti). Sampel diambil secara proporsional dari anggota kelompok sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), terdiri dari KSM dan perorangan. Tabel III.1.

Tabel III.1  
Perkiraan Jumlah Populasi dan Sampel

No	Pecahan Sampel	Populasi	%	Sampel
1.	Anggota dari KSM	290	10	30
2.	Perorangan	98	10	10
	Jumlah	388	10	40

Sumber : Tim Koordinasi P2KP Kelurahan Cepu, 2005 data diolah

## H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan teknis sebagai berikut :

### 1. Primer

#### a. Kuesioner/daftar pertanyaan

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer, dengan cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis kepada sampel dari para anggota penerima manfaat dan para pelaksana program.

#### b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer, dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada informan atau sampel.

#### c. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, dengan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti.

## 2. Skunder

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis/dokumen-dokumen yang langsung berhubungan dengan obyek penelitian, misalnya petunjuk teknis pelaksanaan P2KP, struktur organisasi P2KP, daftar nama keluarga miskin yang menjadi kelompok sasaran P2KP, foto.

### I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan analisis kuantitatif. Analisis ini digunakan untuk membuat interpretasi, prediksi dan menarik kesimpulan dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus statistik.

Koefisien Korelasi Rank Kendall's Tau digunakan untuk mengukur kuatnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara sendiri-sendiri. Rumusnya (Sugiyono, 2002:237) adalah :

$$\tau = \frac{\Sigma A - \Sigma B}{\frac{N(N-1)}{2}}$$

Keterangan :

$\tau$  = Koefisien Korelasi Kendall's Tau, yang besarnya  $(-1 < 0 < 1)$

$\Sigma A$  = Jumlah ranking atas

$\Sigma B$  = Jumlah ranking bawah

$N$  = Jumlah anggota sampel

Untuk mengukur kuatnya hubungan variabel-variabel independen dengan variabel dependen secara bersama-sama digunakan rumus koefisien konkordasi Kendall's sebagai berikut :

$$W = \frac{S}{\frac{1}{2} K^3 (N^3 - N) K \Sigma T}$$

$W$  = Koefisien Konkordansi Rank Kendall's

$S$  = Jumlah Kuadrat deviasi observasi dari mean  $R_j$ .

$K$  = Banyaknya himpunan ranking penjenjangan

$N$  = Banyak obyek atau individu yang diberi ranking

$\Sigma$  = Jumlah nilai  $T$  untuk semua ranking

$T$  = Faktor korelasi ranking berangka sama

Rumus-rumus koefisien korelasi Rank Kendall's, Chi Square dan koefisien konkordansi Kendall's tersebut diatas digunakan disini karena skala ukuran variabel-variabel penelitian ini berskala ordinal.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data program SPSS (*Statistic Package for Social Science*), hasil pengolahan data penelitian menggunakan rumus-rumus statistik diatas selanjutnya merupakan *prin out* komputer dan akan diinterpretasikan dalam penulisan tesis ini.

Hasil deskripsi yang telah disajikan sesuai dengan data yang diperoleh dari pertanyaan dan telah dijawab oleh responden sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh dari variabel yang diteliti. Kemudian untuk melaksanakan uji hipotesis diperlukan skor masing-masing responden yang diteliti. Kategori yang digunakan adalah Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Penyusunan kategori menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I = \frac{K}{R}$$

I = Interval

R = Skor tertinggi – skor terendah

K = Jumlah kelas

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

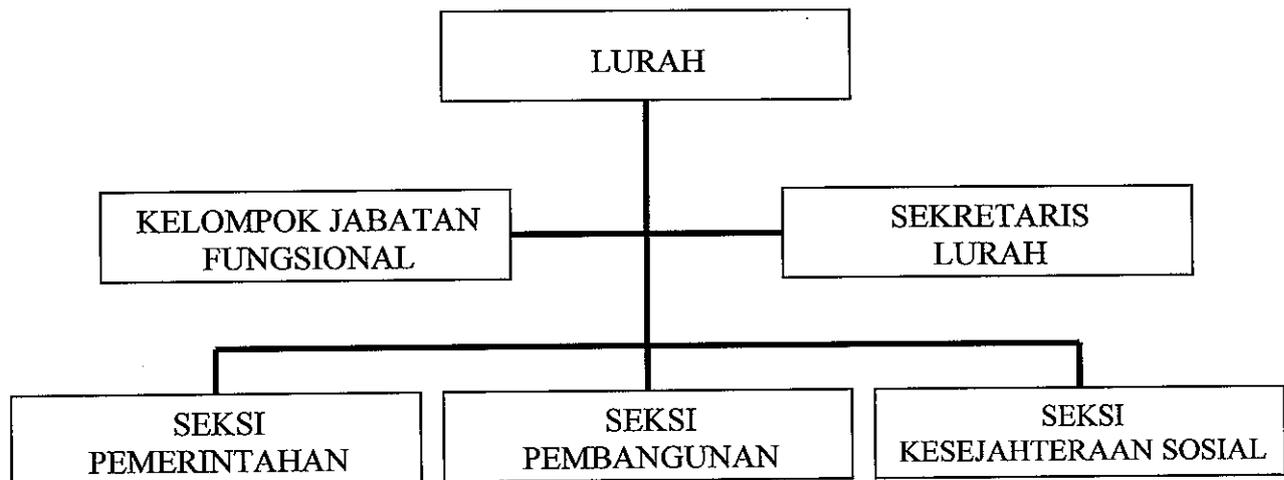
#### A. Deskripsi Wilayah Penelitian

Lokasi penelitian tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Bora berada di wilayah Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Bora. Kelurahan Cepu merupakan salah satu dari 6 (enam) Kelurahan di Kecamatan Cepu yang terletak di tengah kota Cepu, dengan perbatasan yaitu sebelah utara Kelurahan Ngelo dan Kelurahan Karangboyo sebelah timur sungai Bengawan Solo dan Kecamatan Padangan Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan Kelurahan Balun dan sebelah barat Kelurahan Balun. Luas wilayahnya 246,555 Ha, yang terbagi menjadi 13 RW dan 81 RT dengan jumlah Kepala Keluarga 4.415 dengan jumlah penduduk pada tahun 2004 sebanyak 16.145 jiwa, sebanyak 7.925 laki-laki dan 8.220 perempuan. Jarak Kelurahan Cepu dengan ibukota Kecamatan Cepu 0 Km, sedangkan jarak Kelurahan Cepu dengan ibukota Kabupaten Bora lebih kurang 35 Km. **(Kelurahan Cepu : 2005).**

Kantor Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Bora dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 8 Pebruari Tahun 2001

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Blora dan Keputusan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 5 April 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Kabupaten Blora. Adapun struktur pemerintahan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut :

Gambar IV.1  
Bagan Susunan Organisasi Kelurahan Cepu  
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora



Sumber : Perda Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2001

Kegiatan sehari-hari selain melaksanakan tugasnya sesuai dengan Perda Kabupaten Blora dan SK Bupati Blora, Kelurahan Cepu kaitannya dengan pelaksanaan P2KP juga sebagai organisasi pelaksanaan P2KP yang mempunyai hubungan kerja administrasi dengan BKM Kelurahan Cepu.(Gb.I.1). Pengaturan tersebut dimaksudkan agar kemampuan

dalam verifikasi kelayakan dapat dipilih penerima manfaat P2KP secara tepat baik KSM Kelompok dan Perorangan, peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat kelurahan Cepu serta peningkatan kualitas lingkungan.

Komposisi jumlah penduduk di Kelurahan Cepu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1  
Komposisi Penduduk Kelurahan Cepu  
Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Tahun 2004

No	LINGKUNGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	%
1	RW I	622	626	1.248	7,73
2	RW II	528	580	1.108	6,87
3	RW III	676	734	1.410	8,73
4	RW IV	582	594	1.176	7,29
5	RW V	726	713	1.439	8,91
6	RW VI	674	730	1.404	8,69
7	RW VII	596	620	1.216	7,53
8	RW VIII	401	430	831	5,15
9	RW IX	672	686	1.358	8,41
10	RW X	706	720	1.426	8,83
11	RW XI	740	772	1.512	9,37
12	RW XII	617	628	1.245	7,71
13	RW XIII	385	387	772	4,78
	<b>TOTAL</b>	<b>7.925</b>	<b>8.820</b>	<b>16.145</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kantor Kelurahan Cepu, 2005

Komposisi jumlah penduduk di Kelurahan Cepu terlihat dalam tabel 5 bervariasi, hal ini mempengaruhi dalam penentuan penerima manfaat P2KP yang tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk saja namun juga dari beberapa faktor, diantaranya kelancaran angsuran pada

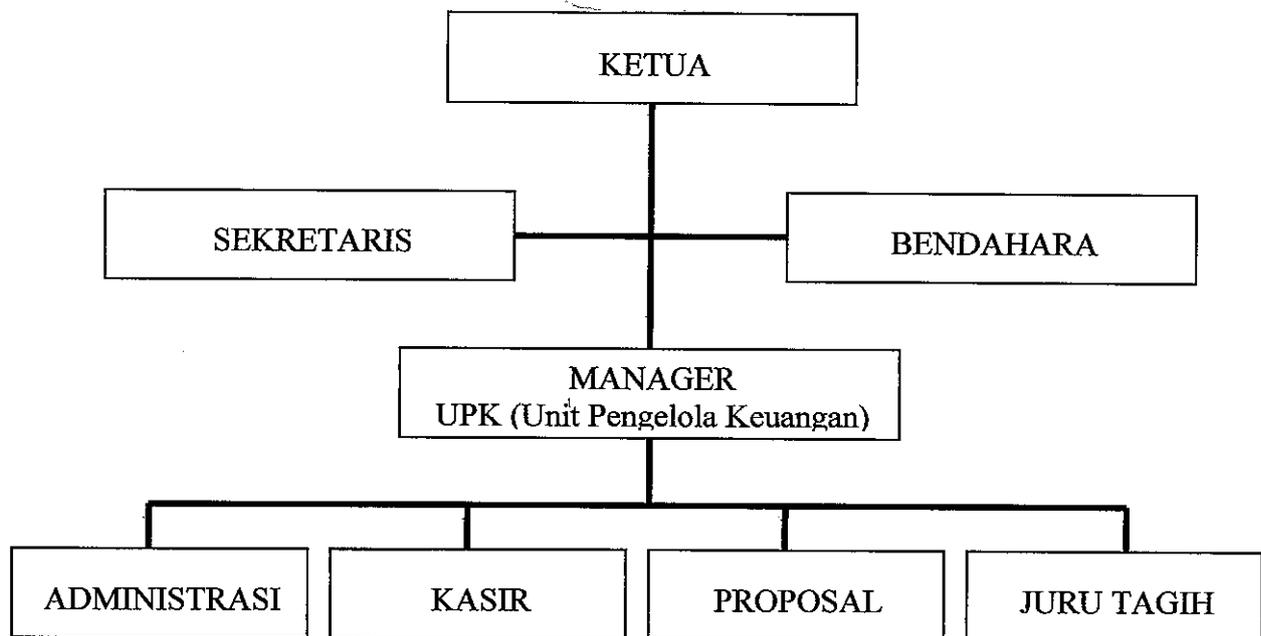
kegiatan bantuan sebelumnya, kemampuan lembaga masyarakat (RT, RW, LKMD, PKK dan Karang taruna) Kelurahan Cepu, kondisi fisik lingkungan-lingkungan di wilayah Kelurahan Cepu. Program unggulan yang dituangkan dalam proposal kegiatan dinyatakan lulus verifikasi dan mendapatkan bantuan dana. Pada kenyataannya berdasarkan wawancara dengan Lurah Cepu dijelaskan bahwa pada akhirnya terdapat kesepakatan antara KSM dan lingkungan-lingkungan dan BKM dalam penentuan penerima manfaat secara bergiliran hingga saat ini. Hal ini sulit bagi BKM dan Kelurahan Cepu untuk menentukan hanya KSM dan lingkungan tertentu yang memenuhi syarat untuk ikut verifikasi penentuan penerima manfaat P2KP. Dengan latar belakang inilah pada akhirnya anggota KSM dan perorangan penerima manfaat menerima pelaksanaan P2KP.

Pelaksanaan P2KP melibatkan lembaga-lembaga pemerintah dan secara khusus dibentuk struktur organisasi pelaksana P2KP. Lembaga pemerintahan yang terlibat meliputi Departemen Keuangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas. Pelaksana P2KP meliputi Tim Koordinasi Pusat/Sekretariat Pusat, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Manajemen Wilayah, Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK),

Fasilitator Kelurahan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM),  
Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).(Gb.1)

Pelaksanaan P2KP di Kelurahan Cepu secara teknis dilaksanakan  
oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “MAKMUR SENTOSA”  
CEPU. Struktur orgnisasi pelaksana P2KP BKM “Makmur Sentosa”  
Kelurahan Cepu adalah sebagai berikut :

Gambar IV.2  
Struktur Organisasi Pelaksanaan P2KP  
BKM “MAKMUR SENTOSA” KELURAHAN CEPU



Sumber : BKM “MAKMUR SENTOSA” Kelurahan Cepu

P2KP Kelurahan Cepu bertujuan mempercepat penanggulangan  
kemiskinan melalui hal-hal berikut :

- Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru;
- Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir pertama di atas;
- Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha-usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok;
- Penyiapan, pengembangan, dan pemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan;
- Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan, melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan. (**Tim Koordinasi P2KP:1999**).

Sasaran utama penerima P2KP Kelurahan Cepu adalah

1. Usulan-usulan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pada tingkat kelurahan yang dianggap memenuhi persyaratan akan dibantu melalui :

- Bantuan kredit modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan;
- Bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan;
- Bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan, untuk mencapai kemampuan pengembangan usaha-usahanya.

Kegiatan-kegiatan itu harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga masyarakat, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, dan harus terbuka untuk diperiksa .

## 2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan dibantu P2KP adalah KSM yang terdiri atas perorangan maupun keluarga miskin yang tinggal di wilayah kelurahan Cepu atau perkotaan. Dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatannya, KSM-KSM ini akan mendapatkan pendampingan dan fasilitator kelurahan.

## 3. Lokasi sasaran

Lokasi sasaran penerima bantuan P2KP difokuskan pada satuan permukiman kelurahan. Satuan permukiman mempunyai makna yang penting mengingat di sinilah muncul kebersamaan dan kesepakatan atas dasar kepentingan yang sama. Selain itu, pada

satuan-satuan permukiman terkonsentrasi pula berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan masalah fisik dengan kepranataan sosialnya sendiri. Oleh karenanya, satuan permukiman perlu dilihat sebagai areal yang memungkinkan adanya integrasi berbagai kegiatan, termasuk integrasi berbagai kegiatan pembangunan sektoral.

Satuan hunian dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Keberadaan satuan permukiman tidak terlepas dari fungsi-fungsi sekitarnya serta struktur fisik prasarana dan sarana yang merupakan bagian dari sistem struktur yang lebih besar. Oleh karena itu satuan permukiman perlu memperhatikan berbagai kondisi sosial, ekonomi, fisik maupun fungsional.
- Seluruh kota (besar, sedang dan kecil) dapat dijadikan lokasi sasaran P2KP. Namun untuk tahap pertama, lokasi sasaran P2KP dibatasi dan ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan data dan pemetaan kelurahan-kelurahan miskin yang berlokasi di kota.

**(Tim Koordinasi P2KP:1999).**

Ketentuan yang ditetapkan BKM "MAKMUR SENTOSA"

Kelurahan Cepu:

1. Dana pinjaman KSM P2KP

- Tercatat sebagai KSM BKM "MAKMUR SENTOSA";
- Mengajukan permohonan tertulis;

- Telah disurvey oleh BKM;
  - Maksimal pinjaman Rp. 1.900.000,- (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Membayar angsuran perbulan dengan bunga 2 %;
2. Peningkatan sarana dan prasarana
- Mengajukan proposal perbaikan lingkungan;
  - Diprioritaskan lingkungan yang belum pernah mendapatkan bantuan;
  - Telah disurvey BKM;
  - Bantuan senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Total dana peningkatan sarana tahun 2004 senilai Rp. 15.525.000,- (lima belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pelatihan
- Total dana pelatihan tahun 2004 senilai Rp.1.396.600,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## B. Hasil Penelitian

Penulis telah melakukan wawancara kepada para pejabat BKM selaku pengelola P2KP di Kelurahan Cepu untuk mengetahui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan lingkungan yang mendapatkan bantuan P2KP, sehingga ketika dilaksanakan penelitian tidak salah sasaran. Akhirnya diperoleh jawaban yang diberikan oleh para responden yang cukup bervariasi dan mendukung hasil penelitian ini.

Hasil penelitian tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan, Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Blora berada di wilayah Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang berkaitan dengan kemampuan organisasi, pengawasan dan komunikasi, pembahasannya sebagai berikut:

### B.1. Variabel Implementasi Kebijakan Program P2KP

Tabel IV.2  
Tingkat Kesesuaian Penggunaan Dana P2KP Kelurahan Cepu

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Tidak Sesuai	0	0,0	0,0
2	Tidak Sesuai	1	2,5	2,5
3	Ragu-ragu	12	30,0	32,5
4	Sesuai	23	57,5	90,0
5	Sangat Sesuai	4	10,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.1

Penggunaan dana yang diberikan kepada anggota KSM penerima manfaat P2KP dalam tabel 4.2 diatas menunjukkan 57,5 % responden menyatakan penggunaan dana P2KP Kelurahan Cepu telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa masyarakat pada umumnya dapat menilai program ini dengan baik .

Meskipun demikian masih terdapat 30 % responden menyatakan keraguannya, responden menilai dana P2KP masih menitik beratkan pada simpan pinjam saja sedangkan untuk penataan lingkungan dan pemberdayaan lembaga masyarakat belum mendapatkan alokasi yang cukup.

Tabel IV.3  
Tingkat Kecukupan Dana Pinjaman P2KP untuk Usaha Produktif

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	0	0,0	0,0
2	Kurang	4	10,0	10,0
3	Ragu-ragu	1	2,5	12,5
4	Cukup	31	77,5	90,0
5	Lebih dari cukup	4	10,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.2

Tabel 4.3 diatas menunjukkan terdapat 77,5 % responden menyatakan dana pinjaman P2KP untuk usaha produktif cukup. Hal ini sesuai dengan pernyataan pengelola program bahwa dana yang

telah diterima tersebut dapat langsung digunakan segera karena pencairannya cepat dan tidak berbelit-belit setelah memenuhi persyaratan pengajuan pinjaman.

Meskipun demikian masih terdapat 10 % responden menyatakan dana tersebut dirasakan masih kurang. Nilai pinjaman yang berlaku di BKM “Makmur Sentosa” Kelurahan Cepu mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Tabel IV.4  
Tingkat Kecukupan Dana P2KP untuk Membangun/Mengembangkan Prasarana dan Sarana (peningkatan jalan lingkungan)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	0	0,0	0,0
2	Kurang	21	52,5	52,5
3	Ragu-ragu	3	7,5	60,0
4	Cukup	13	32,5	92,5
5	Lebih dari Cukup	3	7,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.3

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 21 orang (52,5 %) yang menyatakan dana P2KP untuk pengembangan prasarana dan sarana seperti peningkatan jalan lingkungan, rehab kios untuk mendukung perekonomian kurang. Hal ini menunjukkan pembangunan prasarana

dan sarana kaitannya dengan program peningkatan lingkungan saat ini dirasakan masih kelompok sasaran kurang.

Meskipun demikian terdapat 32,5 % responden menyatakan dana P2KP untuk membangun/mengembangkan prasarana dan sarana (peningkatan jalan lingkungan) cukup, dikarenakan wilayahnya telah mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan berupa peningkatan jalan dan saluran air.

Tabel IV.5  
Tingkat Kesesuaian Prasarana yang dibangun P2KP dengan Kebutuhan Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Tidak Sesuai	0	0,0	0,0
2	Tidak Sesuai	4	10,0	10,0
3	Ragu-ragu	3	7,5	17,5
4	Sesuai	31	77,5	95,0
5	Sangat Sesuai	2	5,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.4

Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 31 orang atau 77,5 % responden menyatakan dana P2KP yang digunakan untuk pengembangan prasarana dan sarana telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan pembangunan prasarana lingkungan kaitannya

dengan peningkatan lingkungan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan dan penataan saluran air.

Meskipun demikian terdapat 10 % responden menyatakan dana P2KP tersebut tidak sesuai, mereka menambahkan bahwa penataan lingkungan yang selama ini dilaksanakan belum merata.

Tabel IV.6  
Administrasi Kegiatan P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Buruk	0	0,0	0,0
2	Buruk	11	27,5	27,5
3	Ragu-ragu	5	12,5	40,0
4	Baik	19	47,5	87,5
5	Sangat baik	5	12,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.5

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa 24 responden atau 47,5 % responden, kurang dari separuh responden menyatakan P2KP diadministrasikan dengan baik.

Responden yang lain sebanyak 27,5 % menyatakan administrasi P2KP buruk. Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Bapak Sucipto (pengurus RW VIII lingkungan Nglajo) bahwa dalam Laporan Kerja Tahunan 2004 tidak dicantumkan jumlah tunggakan yang ada. Hal senada disampaikan Kepala Kelurahan Cepu Bapak Irfan Agustian Iswandar, AP berkaitan dengan administrasi

kegiatan bahwa selama ini BKM “MAKMUR SENTOSA” tidak pernah menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan P2KP sedangkan BKM berpendapat bahwa laporan cukup disampaikan kepada Konsultan Manajemen Wilayah P2KP Blora sesuai struktur pelaksana P2KP (Gb.1).

Tabel IV.6  
Manfaat P2KP kepada Keluarga Miskin secara Langsung

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Tidak Bermanfaat	0	0,0	0,0
2	Tidak Bermanfaat	1	2,5	2,5
3	Ragu-ragu	3	7,5	10,0
4	Bermanfaat	32	80,0	90,0
5	Sangat Bermanfaat	4	10,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.6

Tabel 4.6 diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 32 orang atau 80 % responden menyatakan dana P2KP memberikan manfaat secara langsung kepada keluarga miskin , terutama untuk usaha produktif mereka .

Responden yang lain sebanyak 7,5 % menyatakan keraguannya, mereka menambahkan bahwa yang memperoleh dana pinjaman tersebut ada yang tidak termasuk kategori keluarga miskin

tetapi menikmati fasilitas pinjaman termasuk pengurus BKM dan PNS warga Kelurahan Cepu. Kondisi ini terkait dengan hasil penelitian dalam tabel 4.5 diatas mengenai administrasi P2KP.

Tabel IV.7  
Kontribusi Dana Pinjaman P2KP kepada pengembangan perekonomian

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak Ada	0	0,0	0,0
2	Kecil	1	2,5	2,5
3	Ragu-ragu	2	5,0	7,5
4	Besar	29	72,5	80,0
5	Sangat besar	8	20,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.7

Tabel 9 diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 29 orang (72,5 %) yang menyatakan kontribusi dana pinjaman P2KP untuk usaha produktif bermanfaat dalam pengembangan perekonomian besar. Hal ini menunjukkan pinjaman tersebut memperlancar usaha produktif keluarga miskin dan mendukung perekonomian Kelurahan Cepu.

Responden yang lain sebanyak 5 % menyatakan keraguannya dana pinjaman mampu memperlancar usaha produktif keluarga miskin.

Tabel IV.8  
Dampak P2KP dalam Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Miskin

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak Ada	0	0,0	0,0
2	Kecil	1	2,5	2,5
3	Ragu-ragu	3	7,5	10,0
4	Besar	32	80,0	90,0
5	Sangat besar	4	10,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.8

Tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 32 orang atau 80,0 % responden menyatakan dana P2KP memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan taraf hidup keluarga miskin. Hal ini menunjukkan taraf hidup beberapa keluarga miskin anggota P2KP mengalami peningkatan ke taraf yang lebih baik.

Responden yang lain sebanyak 7,5 % menyatakan keraguannya P2KP memberikan manfaat meningkatkan taraf hidup keluarga miskin ke taraf yang lebih baik.

Tabel IV.9  
Dampak P2KP dalam Penataan Lingkungan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak Ada	0	0,0	0,0
2	Kecil	4	10,0	10,0
3	Ragu-ragu	4	10,0	20,0
4	Besar	32	80,0	100,0
5	Sangat besar	0	0,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.9

Tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 32 orang atau 80 % responden menyatakan P2KP memberikan manfaat yang besar dalam penataan lingkungan. Hal ini menunjukkan peningkatan lingkungan melalui pembangunan parasaran dan sarana dari dana P2KP dapat secara langsung dirasakan masyarakat miskin, seperti di tahun 2004 lingkungan yang mendapatkan pembangunan :

- RW. III RT. 08 Kebun kelapa berupa perbaikan jembatan;
- RW. VI RT.05 Sidodai berupa perbaikan jalan;
- RW. VIII RT. 03 dan 04 Nglajo berupa pengurukan jalan longsor dan pembuatan parit;
- RW IX. RT.01 Unyeran berupa pengurukan jalan longsor dan pembuatan parit;
- RW X. RT.05 Sitimulyo berupa perbaikan jalan;

- RW. XI RT. 01 Sitimulyo berupa perbaikan jalan;
- RW. XI RT. 06 Asem telu berupa perbaikan jalan;
- RW. XI RT. 07 Tegalrejo timur berupa pengurukan jalan longsor dan pembuatan parit;
- RW XI. meliputi RT. 08 dan 09 Tegalrejo barat berupa perbaikan jalan dan saluran air;
- RW. XIII RT. 03 Wonorejo berupa renovasi TK Pertiwi;
- Kelurahan Cepu berupa rehab Balai Kelurahan;

Sumber : BKM "Makmur Sentosa" Kelurahan Cepu, 2005

Responden yang lain sebanyak 10,0 % menyatakan dampak P2KP dalam penataan lingkungan kecil, mereka menambahkan bahwa penetapan lokasi lingkungan kurang merata, dengan kata lain lingkungan mereka belum mendapatkan giliran penataan lingkungan.

Tabel IV.10  
Dampak P2KP dalam Mengentaskan Keluarga Miskin ke Kondisi yang Lebih Baik

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak Ada	0	0,0	0,0
2	Kecil	2	5,0	5,0
3	Ragu-ragu	19	47,5	52,5
4	Besar	16	40,0	92,5
5	Sangat besar	3	7,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.10

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa hampir setengah jumlah responden yaitu 19 orang (47,5 %) yang menyatakan keraguannya bahwa P2KP mampu mengentaskan keluarga miskin ke kondisi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan keluarga miskin yang menjadi KSM P2KP sejak tahun 1999 dan mendapatkan fasilitas dana pinjaman belum mampu secara optimal meningkatkan taraf hidupnya ke kondisi yang lebih baik . Penulis menemukan fakta bahwa kualitas susunan keanggotaan KSM dan perorangan agak diragukan dengan ditemukannya anggota yang sebenarnya tidak termasuk kategori keluarga miskin menjadi anggota KSM dan perorangan dan menikmati fasilitas pinjaman P2KP.

Responden yang lain sebanyak 40,0 % responden menyatakan dampak P2KP dalam mengentaskan keluarga miskin ke kondisi yang lebih baik besar.

Tabel IV.11  
Dampak P2KP dalam memberikan kesempatan mendapatkan lapangan kerja baru

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak Ada	0	0,0	0,0
2	Kecil	13	32,5	32,5
3	Ragu-ragu	5	12,5	45,0
4	Besar	14	35,0	80,0
5	Sangat besar	8	20,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.11

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa 14 orang (35 %) responden menyatakan bahwa P2KP dalam memberikan kesempatan mendapatkan lapangan kerja baru besar, yaitu melalui usaha produktif KSM dan perorangannya.

Responden lain sejumlah 32,5 % menyatakan P2KP dalam memberikan lapangan kerja baru kecil. Kondisi ini dikarenakan mereka tidak mampu meningkatkan usaha produktifnya sebagian lain tidak mampu menjalankan usaha produktifnya dikarenakan kondisi ekonomi yang secara umum belum mendukung.

Tabel IV.12  
Dampak P2KP dalam memberikan Kesempatan Meningkatkan Usaha Produktif

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak Ada	0	0,0	0,0
2	Kecil	1	2,5	2,5
3	Ragu-ragu	2	7,5	10,0
4	Besar	30	75,0	85,0
5	Sangat besar	6	15,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.12

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 30 orang (75 %) menyatakan P2KP memberikan dampak yang besar dalam memberikan kesempatan meningkatkan usaha produktif keluarga miskin. Hal ini menunjukkan dana yang

dipinjamkan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada keluarga miskin untuk lebih meningkatkan usaha produktifnya.

Responden lain sebesar 7,5 % responden menyatakan keraguannya bahwa P2KP memberikan kesempatan kepada keluarga miskin untuk meningkatkan usaha produktifnya.

Sejauhmana peran implementasi kebijakan (Y) dinyatakan baik atau tidak baik dapat diukur melalui pilihan dari lima kategori dari hasil deskripsi yang telah disajikan sesuai dengan data yang diperoleh sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh dari variabel yang diteliti. Kemudian untuk melakukan uji hipotesis diperoleh skor masing-masing responden yang diteliti. Kategori yang digunakan adalah : Sangat baik, Baik, Kurang baik, Buruk dan Sangat Buruk, dengan ketentuan dalam tabel berikut.

Tabel IV.13  
Kategorisasi Penilaian

No	Kategori	%
1	Sangat Buruk	0,00 – 19,99
2	Buruk	20,00 – 39,99
3	Kurang baik	40,00 – 59,99
4	Baik	60,00 – 79,99
5	Sangat Baik	80,00 – 99,99

Berdasarkan tabel-tabel sebelumnya maka dibuat hasil keseluruhan sebagai kesatuan variabel Implementasi Kebijakan P2KP.

Tabel IV.14  
Kategorisasi Variabel Implementasi Kebijakan P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Buruk	0	0,0	0,0
2	Buruk	1	2,5	2,5
3	Biasa saja	12	32,5	35,0
4	Baik	22	52,5	87,5
5	Sangat Baik	4	12,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.1 s/d 12

Tabel 4.14 menunjukkan jumlah kategori baik dari variabel Implementasi Kebijakan P2KP yaitu penilaian sangat baik ditambah baik, sehingga kategori baik adalah 65 %. Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan P2KP Kelurahan Cepu secara umum baik dengan prosentase 65 %.

Untuk kategori biasa saja yaitu penilaian bahwa Implementasi Kebijakan P2KP adalah biasa saja sebesar 32,5 %. Responden menyatakan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan P2KP Kelurahan Cepu sama seperti program pemerintah di masa lalu seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT) tanpa disertai perubahan yang lebih baik.

Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangnya , antara lain disebabkan dari kemampuan organisasi pelaksana yang rendah, pengawasan yang rendah dan komunikasi yang kurang efektif lebih lanjut akan dibahas sebagai berikut.

## B.2. Variabel Kemampuan Organisasi

Tabel IV.15  
Tingkat Kecukupan Tenaga Pelaksana BKM P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	0	0,0	0,0
2	Kurang	3	7,5	7,5
3	Ragu-ragu	2	5,0	12,5
4	Cukup	30	75,0	87,5
5	Lebih dari Cukup	5	12,5	100,0
	Jumlah			

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.13

Tabel 4.15 diatas menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 30 orang atau 75 % responden menyatakan tenaga pelaksana BKM P2KP cukup. Hal ini menunjukkan P2KP dijalankan dengan tenaga pelaksana yang cukup dan mampu melayani keluarga miskin penerima manfaat.

Responden yang lain sebanyak 7,5 % responden menyatakan tenaga pelaksana BKM P2KP kurang.

Tabel IV.16  
Tingkat Pendidikan Pelaksana BKM P2KP

No	Pendidikan	Jumlah	%	Kumulatif %
1	SLTA	3	37,5	37,5
2	D III	1	12,5	50,0
3	S 1	4	50,0	100,0
	Jumlah	8	100,00	

Sumber : BKM "MAKMUR SENTOSA" Kelurahan Cepu

Gambar 4.16 menunjukkan bahwa pelaksana P2KP Kelurahan Cepu berjumlah 8 (delapan) orang, di lihat dari tingkat pendidikan adalah untuk pendidikan SLTA 3 (tiga) orang (37,5%), D III 1 (satu) orang (12,5 %) dan tertinggi pendidikan S 1 sebanyak 4 (empat) orang (50%).

Pendapat responden tentang tingkat pendidikan pelaksana P2KP terangkum dalam tabel berikut.

Tabel IV.17  
Tingkat Pendidikan Pelaksana P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	0	0,0	0,0
2	Kurang	1	2,5	2,5
3	Ragu-ragu	3	7,5	10,0
4	Cukup	30	75,0	85,0
5	Lebih dari Cukup	6	15,0	100,0
	Jumlah	40		

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.14

Tabel 4.17 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 30 orang atau sebesar 75 % responden menyatakan tingkat pendidikan pelaksana P2KP telah mencukupi. Hal ini menunjukkan responden menilai tenaga pelaksana ditinjau dari tingkat pendidikan mampu untuk menjalankan program P2KP.

Responden yang lain sebanyak 2,5 % responden menyatakan tingkat pendidikan pelaksana P2KP kurang.

Tabel IV.18  
Tingkat Keterampilan Pelaksana P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	0	0,0	0,0
2	Kurang	2	5,0	5,0
3	Ragu-ragu	3	7,5	12,5
4	Cukup	31	77,5	90,0
5	Lebih dari Cukup	4	10,0	100,0
	Jumlah	40	100,00	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.15

Tabel 4.18 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 31 orang atau sebesar 77,5 % menyatakan bahwa keterampilan pelaksana P2KP cukup. Hal ini menunjukkan pelaksana P2KP cukup terampil melayani keluarga miskin anggota KSM P2KP dalam memproses pengajuan dana pinjaman, pemeriksaan permohonan dan pencairan pinjaman.

Responden lain sebanyak 5 % responden menyatakan keterampilan pelaksana P2KP kurang.

Tabel IV.19  
Tingkat Pengalaman Pelaksana P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	0	0,0	0,0
2	Kurang	2	5,0	5,0
3	Ragu-ragu	6	15,0	20,0
4	Cukup	28	70,0	90,0
5	Lebih dari Cukup	4	10,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.16

Tabel 4.19 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 28 orang atau sebesar 70 % responden menyatakan pelaksana P2KP cukup berpengalaman. Hal ini menunjukkan pelaksana P2KP sebelum dan selama mengelola P2KP memiliki bekal pengalaman dan dalam lima tahun terakhir menjadi pengelola P2KP turut meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya.

Responden lain sebanyak 15 % menyatakan keraguannya, mereka menambahkan bahwa pengurus BKM P2KP kurang berpengalaman dalam bidang kewilayahan dikarenakan susunan pelaksanaannya terbatas yaitu sejumlah 8 (delapan) orang. Wilayah Kelurahan Cepu terbagi dalam 13 wilayah RW (Rukun Warga)

sehingga terdapat 5 RW yang tidak terwakili dan harus diampu oleh satu pengurus untuk beberapa RW, pengalaman di wilayah RW lain sangat terbatas untuk melayani KSM wilayah tersebut.

Penulis mengunjungi kantor BKM “MAKMUR SENTOSA” Kelurahan Cepu yang menempati 2 (dua) ruang Kantor Kelurahan Cepu mendapati inventaris kantor sebagai berikut :

Tabel IV.20  
Daftar inventaris Kantor BKM “MAKMUR SENTOSA” Kelurahan Cepu

No	Nama Barang	Jumlah
1	Komputer dan printer lengkap	2
2	Mesin Ketik	1
3	Brankasi besi	1
4	Meja Kerja	5
5	Filing Cabinet	1
6	Kalkulator	6
7	Alat deteksi uang	2
8	Kamera foto	1
9	Kipas angin	2

Sumber : Kantor BKM “MAKMUR SENTOSA” Kelurahan Cepu

Kegiatan administrasi BKM selama ini dapat dikerjakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan menggunakan 2 (dua) unit komputer. Perlengkapan kantor BKM P2KP dirasakan mencukupi untuk melakukan pelayanan kepada KSM Keluarga miskin, seperti alat deteksi uang, kalkulator, filing cabinet dan brankas untuk menyimpan sementara uang angsuran.

Tabel IV.21  
Tingkat Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pelaksana P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	0	0,0	0,0
2	Kurang	5	12,5	12,5
3	Ragu-ragu	3	7,5	20,0
4	Cukup	31	77,5	97,5
5	Lebih dari Cukup	1	2,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.17

Tabel IV.21 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 31 orang atau sebesar 77,5 % responden menyatakan prasarana dan sarana pelaksana P2KP telah mencukupi. Hal ini menunjukkan prasarana dan sarana pelaksana P2KP telah mencukupi dan menunjang pelaksanaan P2KP.

Responden yang lain sebanyak 12,5 % menyatakan prasarana dan sarana pelaksana P2KP kurang.

Tabel IV.22  
Tingkat Kesiapan Pelaksana P2KP secara Struktur Organisasi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Tidak Siap	0	0,0	0,0
2	Tidak Siap	13	32,5	32,5
3	Ragu-ragu	3	7,5	40,0
4	Siap	19	47,5	87,5
5	Sangat Siap	5	12,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.18

Tabel IV.22 menunjukkan kurang dari setengah jumlah responden yaitu 19 orang atau sebesar 47,5 % responden menyatakan pelaksana P2KP siap secara struktur organisasi. Hal ini menunjukkan organisasi pelaksana P2KP (Gb. I.1) belum mampu membagi habis tugas dan wewenang pengelolaan P2KP.

Responden yang lain sebanyak 32,5 % responden menyatakan pelaksana P2KP secara struktur organisasi tidak siap, mereka menambahkan struktur P2KP yang saat ini meletakkan Kelurahan Cepu hanya hubungan koordinasi administrasi (Gb.I.1) dan menjadi alasan utama BKM untuk meninggalkan Organisasi Kelurahan dengan hanya menyampaikan laporan bulanan kepada Konsultan Manajemen Wilayah. Kenyataan di lapangan pelaksanaan P2KP tumpang tindih dengan program Dana Pembangunan Desa/Kelurahan, JPS Askes, UP2K yang memiliki tujuan yang sama. Penulis menemukan bahwa penentuan lokasi penataan lingkungan ditumpangi kepentingan politik "oknum" pengurus BKM pada saat pemilihan legislatif Tahun 2004 lalu meski akhirnya "oknum" tersebut tidak terpilih.

Tabel IV.23  
Tingkat Kewenangan Pelaksana P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	0	0,0	0,0
2	Kurang	3	7,5	7,5
3	Ragu-ragu	6	15,0	22,5
4	Cukup	29	72,5	95,0
5	Lebih dari Cukup	2	5,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.19

Tabel IV.23 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 29 orang atau sebesar 72,5 % responden menyatakan pelaksana P2KP memiliki kewenangan yang cukup dalam menjalankan program. Hal ini menunjukkan pelaksanaan tugas sesuai tugas, pokok dan fungsi serta langkah pemecahan masalah secara umum dapat diselesaikan dengan baik.

Responden yang lain sebanyak 15 % responden meragukan kewenangan pelaksana P2KP.

Tabel IV.24  
Tingkat Kemampuan Organisasi Pelaksana P2KP dalam Meningkatkan Kualitas SDM Pegawainya

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	0	0,00	0,0
2	Kurang	5	12,5	12,5
3	Ragu-ragu	9	22,5	35,0
4	Cukup	18	45,0	80,0
5	Lebih dari Cukup	8	20,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.20

Tabel IV.24 menunjukkan bahwa kurang dari setengah jumlah responden yaitu 18 orang atau 45 % responden menyatakan organisasi pelaksana P2KP memiliki kemampuan cukup dalam meningkatkan kualitas SDM pegawainya. Hal ini menunjukkan pelaksana P2KP telah melakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan baik sejak persiapan pelaksanaan P2KP juga pelatihan yang bersifat evaluatif dan peningkatan keterampilan pengelolaan P2KP yang diadakan di tingkat konsultan manajemen wilayah maupun di tingkat kabupaten.

Responden yang lain sebanyak 22,5 % responden menyatakan keraguannya organisasi pelaksana P2KP memiliki kemampuan yang cukup dalam meningkatkan kualitas SDM pegawainya.

Sejauhmana peran Kemampuan Organisasi (X1) dinyatakan baik atau tidak baik dapat diukur melalui pilihan dari lima kategori dari hasil deskripsi yang telah disajikan sesuai dengan data yang diperoleh sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh dari variabel yang diteliti. Kemudian untuk melakukan uji hipotesis diperoleh skor masing-masing responden yang diteliti. Kategori yang digunakan adalah : Sangat baik, Baik, Kurang Baik, Buruk dan Sangat Buruk, dengan ketentuan dalam tabel berikut.

Tabel IV.25  
Kategorisasi Penilaian

No	Kategori	%
1	Sangat Buruk	0,00 – 19,99
2	Buruk	20,00 – 39,99
3	Kurang baik	40,00 – 59,99
4	Baik	60,00 – 79,99
5	Sangat Baik	80,00 – 99,99

Berdasarkan tabel-tabel sebelumnya maka dibuat hasil keseluruhan sebagai kesatuan variabel Kemampuan Organisasi.

Tabel IV.26  
Kategorisasi Variabel Kemampuan Organisasi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat buruk	0	0,0	0,0
2	Buruk	1	2,5	2,5
3	Biasa saja	15	37,5	40,0
4	Baik	19	47,5	87,5
5	Sangat baik	5	12,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.13 s/d 20

Tabel 23 diatas menunjukkan jumlah kategori baik dari variabel Kemampuan Organisasi yaitu penilaian sangat baik ditambah baik, sehingga kategori baik adalah sebesar 60 %.

Untuk kategori Kemampuan Organisasi biasa saja adalah sebesar 37,5%. hasil penelitian penulis menemukan bahwa struktur organisasi P2KP (Gb I.1) terdapat kelemahan hubungan dengan Organisasi Kelurahan Cepu yang ditunjukkan pula dengan hasil penelitian pada Gambar 16 ditambah pula dalam struktur organisasi pelaksanaan P2KP BKM “MAKMUR SENTOSA” terdapat posisi juru tagih (Gb.IV.2) dimana selama tiga tahun terakhir memegang peranan penting untuk mengelola jumlah tunggakan peminjam yang menunjukkan kecenderungan kenaikan. Kondisi ini mengakibatkan beban kerja juru tagih bertambah dan hanya diampu oleh 1 (satu) orang pelaksana. Hal ini mengakibatkan hasil penagihan tidak dapat maksimal, meski dijelaskan oleh ketua BKM bahwa telah dilakukan upaya untuk meningkatkan fungsi dan peran juru tagih dengan melibatkan petugas pengelola yang lain. Upaya yang ditempuh tersebut menemui kendala pada peminjam yang menunggak tidak menunjukkan sikap kooperatif dan berupaya untuk menghindar dari penagihan dari pengelola.

## B.3. Variabel Pengawasan

Tabel IV. 27  
Tingkat Ketersediaan Aturan Pelaksana P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak Ada	0	0,0	0,0
2	Tidak mencukupi	1	2,5	2,5
3	Ragu-ragu	7	17,5	20,0
4	Tersedia	26	65,0	85,0
5	Sangat Tersedia	6	15,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.21

Tabel IV.27 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 26 orang atau sebesar 65 % responden menyatakan aturan pelaksana P2KP tersedia dan sewaktu-waktu dapat diakses oleh keluarga miskin penerima manfaat. Hal ini menunjukkan pelaksanaan P2KP ditinjau dari ketersediaan aturan pelaksanaan tersedia dan menunjang pelaksanaan.

Responden yang lain sebanyak 17,5 % responden menyatakan keraguannya bahwa aturan pelaksanaan tersedia.

Tabel IV.28  
Tingkat Kejelasan dan Kemudahan Memahami Aturan Pelaksana P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Tidak Jelas dan sulit dipahami	0	0,0	0,0
2	Tidak Jelas dan sulit dipahami	3	7,5	7,5
3	Ragu-ragu	4	10,0	17,5
4	Jelas dan mudah dipahami	19	47,5	65,0
5	Sangat Jelas dan mudah dipahami	14	35,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.22

Tabel IV.28 menunjukkan bahwa kurang dari setengah jumlah responden yaitu 19 orang (47,5 %) yang menyatakan aturan pelaksana P2KP yang tersedia jelas dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan pelaksanaan P2KP yang dituangkan dalam aturan pelaksana dapat diterima, dipahami dan dipatuhi oleh KSM penerima manfaat.

Responden yang lain sebanyak 7,5 % menyatakan tidak jelas dan sulit memahami aturan pelaksana P2KP yang tersedia.

Tabel IV.29  
Tingkat Kesesuaian antara Penetapan Standar dalam Aturan Pelaksana P2KP dengan Kondisi Riil Masyarakat

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Tidak Sesuai	0	0,0	0,0
2	Tidak Sesuai	5	12,5	12,5
3	Ragu-ragu	13	32,5	45,0
4	Sesuai	16	40,0	85,0
5	Sangat Sesuai	6	15,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.23

Tabel IV.29 menunjukkan bahwa kurang dari setengah jumlah responden yaitu 16 orang (40 %) yang menyatakan penetapan standar dalam aturan pelaksana P2KP sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini menunjukkan penetapan standar untuk

melaksanakan P2KP dapat diterima dan dijalankan oleh KSM penerima manfaat.

Responden yang lain sebanyak 12,5 % menyatakan penetapan standar dalam aturan pelaksana P2KP tidak sesuai dengan kondisi masyarakat.

Tabel IV.30  
Tingkat Kesesuaian antara Hasil Kegiatan P2KP dengan Standar Kegiatan yang Ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Tidak Sesuai	0	0,0	0,0
2	Tidak Sesuai	3	7,5	7,5
3	Ragu-ragu	20	50,0	57,5
4	Sesuai	16	40,0	97,5
5	Sangat Sesuai	1	2,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.24

Tabel IV.30 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 20 orang atau sebesar 50 % responden menyatakan keraguannya bahwa hasil kegiatan P2KP sesuai dengan standar kegiatan yang ditetapkan yaitu menjadikan KSM penerima manfaat meningkatkan taraf hidupnya dan pembangunan peningkatan kualitas lingkungan atau mempertahankan kualitas lingkungan yang sudah ada dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada.

Responden lain sejumlah 16 orang atau sebesar 40 % responden menyatakan sesuai.

Tabel IV.31  
Tingkat Kesesuaian Pelaksanaan P2KP dengan Kebutuhan Kelurahan Cepu

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Tidak Sesuai	1	2,5	2,5
2	Tidak Sesuai	2	5,0	7,5
3	Ragu-ragu	14	35,0	42,5
4	Sesuai	22	55,0	97,5
5	Sangat Sesuai	1	2,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.25

Tabel IV.31 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 22 orang atau sebesar 55 % responden yang menyatakan pelaksanaan P2KP sesuai dan memenuhi kebutuhan kelurahan Cepu terutama dalam memperkuat perekonomian KSM penerima manfaat dan penataan lingkungan.

Responden lain sebesar 35 % meragukan pelaksanaan P2KP selaras dan sesuai dengan kebutuhan kelurahan, mereka menambahkan P2KP hanya menitik beratkan simpan pinjam keluarga miskin dan mengesampingkan sektor lain seperti penataan lingkungan dan penguatan lembaga kemasyarakatan.

Tabel IV.32  
Tingkat Obyektivitas dan Kejujuran Organisasi Pelaksana P2KP dalam melaksanakan Pengawasan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat kurang	0	0,0	0,0
2	Kurang	3	7,5	7,5
3	Ragu-ragu	7	17,5	25,0
4	Cukup	22	55,0	80,0
5	Lebih dari cukup	8	20,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.26

Tabel IV.32 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 22 orang atau sebesar 55 % responden menyatakan organisasi Pelaksana BKM P2KP cukup obyektif dan jujur dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini menunjukkan dalam melaksanakan pengawasan pelaksana BKM P2KP cukup obyektif dan jujur.

Responden yang lain 17,5 % responden meragukan obyektivitas dan kejujuran organisasi pelaksana P2KP dalam melaksanakan pengawasan, mereka menambahkan bahwa adanya beberapa pengurus mendapatkan fasilitas pinjaman tentunya membawa dampak bahwa pengurus dengan sendirinya akan berkurang tingkat obyektivitas dan kejujurannya.

Tabel IV.33  
Tingkat Kesalahan Pelaksana P2KP dalam Melaksanakan Kegiatan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Sering	1	2,5	2,5
2	Sering	3	7,5	10,0
3	Ragu-ragu	10	25,0	35,0
4	Jarang	15	37,5	72,5
5	Tidak Pernah	11	27,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.27

Tabel IV.33 menunjukkan 15 orang responden atau sebesar 37,5 % responden menyatakan pelaksana BKM P2KP jarang melakukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan. Hal ini menunjukkan pelaksana BKM P2KP secara umum dapat dikatakan jarang melakukan kesalahan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukannya.

Responden yang lain sebesar 25 % menyatakan keraguannya pelaksana BKM P2KP melakukan kesalahan dalam melaksanakan kegiatan.

Tabel IV.34  
Tingkat Kecepatan Pelaksana P2KP dalam Memecahkan Masalah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Dibiarkan	0	0,0	0,0
2	Lambat	5	12,5	12,5
3	Ragu-ragu	9	22,5	35,0
4	Cepat	21	52,5	87,5
5	Sangat Cepat	5	12,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.28

Tabel IV.34 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 21 orang atau sebesar 52,5 % responden menyatakan pelaksana P2KP dalam menangani dan memecahkan masalah berkaitan dengan pelaksanaan P2KP cepat.

Responden yang mengeluhkan kelambatan pelaksana P2KP dalam menangani masalah sebesar 12,5 % responden.

Tabel IV.35  
Tingkat Kontinuitas Organisasi Pelaksana P2KP dalam Melaksanakan Pengawasan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	1 tahun sekali	1	2,5	2,5
2	6 bulan sekali	3	7,5	10,0
3	3 bulan sekali	9	22,5	32,5
4	1 bulan sekali	25	62,5	95,0
5	2 minggu sekali	2	5,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.29

Gambar IV.35 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 25 orang atau sebesar 62,5 % responden menyatakan pelaksana P2KP dalam melakukan pengawasan sebulan sekali. Hal ini menunjukkan pelaksana melakukan pengawasan secara rutin kepada KSM penerima manfaat dan perorangnya setiap bulannya.

Responden lain sebesar 22,5 % responden menyatakan pelaksana P2KP melakukan pengawasan 3 bulan sekali

Sejauhmana peran Pengawasan (X2) dinyatakan baik atau tidak baik dapat diukur melalui pilihan dari lima kategori dari hasil deskripsi yang telah disajikan sesuai dengan data yang diperoleh sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh dari variabel yang diteliti. Kemudian untuk melakukan uji hipotesis diperoleh skor masing-masing responden yang diteliti. Kategori yang digunakan adalah : Sangat baik, Baik, Biasa saja, Buruk dan Sangat Buruk, dengan ketentuan dalam tabel berikut.

Tabel IV.36  
Kategorisasi Penilaian

No	Kategori	%
1	Sangat Buruk	0,00 – 19,99
2	Buruk	20,00 – 39,99
3	Kurang baik	40,00 – 59,99
4	Baik	60,00 – 79,99
5	Sangat Baik	80,00 – 99,99

Berdasarkan tabel-tabel sebelumnya maka dibuat hasil keseluruhan sebagai kesatuan variabel Pengawasan.

Tabel IV.37  
Kategorisasi Variabel Pengawasan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Buruk	1	2,5	2,5
2	Buruk	11	27,5	30,0
3	Biasa saja	9	22,5	52,5
4	Baik	12	30,0	82,5
5	Sangat Baik	7	17,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.21 s/d 29

Tabel IV.37 menunjukkan jumlah kategori baik dari variabel Pengawasan yaitu penilaian sangat baik ditambah baik, sehingga kategori baik adalah sebesar 47,5 %. Kategori variabel Pengawasan dibandingkan dengan tabel IV.36, diperoleh penilaian kategori variabel pengawasan kurang baik.

Kategori variabel Pengawasan secara umum masih kurang baik, didukung dengan laporan keuangan tahun 2005 bahwa tunggakan yang macet (diatas 21 bulan) untuk KSM BKM ‘MAKMUR SENTOSA’ per Januari 2005 sebesar Rp. 113.635.667,00 (Seratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), terkait dengan hal tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel IV.32 bahwa obyektifitas dan kejujuran pelaksana P2KP dinilai cukup hanya oleh sekitar 55 % responden saja.

#### B.4. Variabel Komunikasi

Tabel IV.38  
Tingkat Keseringan Sosialisasi P2KP (Penjelasan, pengumuman) oleh Pelaksana P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak Pernah	1	2,5	2,5
2	Jarang	9	22,5	25,0
3	Ragu-ragu	7	17,5	42,5
4	Sering	23	57,5	87,5
5	Sangat Sering	0	0,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.30

Tabel IV.38 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 23 orang (57,5 %) menyatakan pelaksana P2KP sering melakukan sosialisasi terutama melalui pengumuman dan edaran.

Responden lain sebesar 22,5 % responden menyatakan pelaksana P2KP jarang melakukan sosialisasi, mereka menambahkan seperti program Kartu Sehat yang digulirkan oleh BKM P2KP di tahun 2005 karena kurang sosialisasi maka banyak keluarga miskin yang menganggap program ini sama dengan program JPS Askes kelanjutan dari JPS bidang kesehatan terlebih bersamaan dengan program pemerintah untuk pengalihan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) ke bidang Kesehatan yang mengakibatkan kenaikan harga BBM baru-baru ini.

Tabel IV.39  
Tingkat Kualitas Informasi yang diterima

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Tidak Jelas	0	0,0	0,0
2	Tidak Jelas	4	10,0	10,0
3	Ragu-ragu	5	12,5	22,5
4	Jelas	26	65,0	87,5
5	Sangat Jelas	5	12,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.31

Tabel IV.39 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 26 orang atau sebesar 65 % responden menyatakan Informasi P2KP yang diterima cukup jelas. Hal ini menunjukkan secara umum informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh keluarga miskin penerima manfaat.

Responden sebesar 10 % menyatakan informasi P2KP yang diterima tidak jelas.

Kelurahan yang mendapat program P2KP selain Kelurahan Cepu untuk fase I adalah Kelurahan Balun dan Kelurahan Jepon, berikut pendapat responden mengenai koordinasi yang dilakukan pelaksana P2KP Kelurahan Cepu,

Tabel IV.40  
Tingkat Keseringan Koordinasi antar Organisasi Pelaksana P2KP Kelurahan Lain

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak pernah	2	5,0	5,0
2	Jarang	3	7,5	12,5
3	Ragu-ragu	15	37,5	50,0
4	Sering	20	50,0	100,0
5	Sangat sering	0	0,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.32

Gambar IV.40 menunjukkan bahwa setengah jumlah responden yaitu 20 orang (50 %) yang menyatakan pelaksana P2KP BKM "MAKMUR SENTOSA" sering melakukan koordinasi dengan

BKM Kelurahan lainnya, hal ini sesuai dengan pernyataan pengurus bahwa di tingkat Kabupaten telah dibentuk forum BKM “MUSTIKA” Blora yang saat ini ditambah dengan perguliran P2KP fase II jumlah anggota forum tersebut sejumlah 11 BKM P2KP.

Responden lain 37,5 % responden menyatakan keraguan koordinasi yang dilakukan pelaksana P2KP BKM “MAKMUR SENTOSA”. Hal ini terkait dengan buruknya komunikasi dengan KSM kelompok sasaran.

Tabel IV.41  
Tingkat Keseringan Komunikasi dengan selain Pelaksana P2KP yang masih memiliki Keterkaitan dengan Program P2KP

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak Pernah	0	0,0	0,0
2	Jarang	7	17,5	17,5
3	Ragu-ragu	12	30,0	47,5
4	Sering	20	50,0	97,5
5	Sangat Sering	1	2,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.33

Tabel IV.41 menunjukkan bahwa setengah jumlah responden yaitu 20 orang atau sebesar 50 % responden menyatakan pelaksana BKM P2KP cukup sering melakukan koordinasi dengan pelaksana program Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan P2SE. Hal

ini komunikasi yang bersifat koordinasi telah dilakukan oleh pelaksana P2KP dan diketahui oleh anggota KSM penerima manfaat.

Responden lain sebesar 17,5 % responden menyatakan pelaksana BKM P2KP jarang berkomunikasi dengan selain Pelaksana P2KP yang masih memiliki keterkaitan dengan Program P2KP.

Tabel IV.42  
Tingkat Keragaman penggunaan Media Komunikasi oleh Pelaksana P2KP  
(surat edaran, surat kabar, radio, pertemuan)

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Kurang	2	5,0	5,0
2	Kurang	7	17,5	22,5
3	Ragu-ragu	8	20,0	42,5
4	Cukup	23	57,5	100,0
5	Lebih dari Cukup	0	0,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.34

Tabel IV.42 menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yaitu 23 orang atau sebesar 57,5 % menyatakan pelaksana P2KP menyebarkan informasi dengan media yang cukup beragam, melalui surat edaran, pengumuman dan pertemuan.

Responden lain sebesar 17,5 % responden menyatakan penggunaan media kurang beragam, mereka tidak melihat penggunaan radio dan surat kabar untuk mensosialisasikan P2KP lebih lanjut, mereka menambahkan informasi yang diterima sering berupa pengumuman saja.

Tabel IV.43  
Tindakan Anggota KSM penerima manfaat dalam menyampaikan Permasalahan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Tidak disampaikan	4	10,0	10,0
2	Melalui kotak saran	10	25,0	35,0
3	Saat rapat tahunan	11	27,5	62,5
4	Saat rapat bulanan	8	20,0	82,5
5	Tiap ada unek-unek	7	17,5	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.35

Tabel IV.43 menunjukkan bahwa prosentase terbesar jumlah responden yang memanfaatkan rapat tahunan BKM P2KP untuk menyampaikan permasalahan, usul, saran sebesar 27,5% responden atau 11 orang responden.

Responden lain sebesar 25 % responden menyatakan mereka menyampaikan permasalahan melalui kotak saran yang disediakan pelaksana BKM P2KP.

Sejauhmana peran Komunikasi (X3) dinyatakan baik atau tidak baik dapat diukur melalui pilihan dari lima kategori dari hasil deskripsi yang telah disajikan sesuai dengan data yang diperoleh sehingga memberikan gambaran secara menyeluruh dari variabel yang diteliti. Kemudian untuk melakukan uji hipotesis diperoleh skor masing-masing responden yang diteliti. Kategori yang digunakan adalah : Sangat baik, Baik, kurang baik, Buruk dan Sangat Buruk, dengan ketentuan dalam tabel berikut.

Tabel IV.44  
Kategorisasi Penilaian

No	Kategori	%
1	Sangat Buruk	0,00 – 19,99
2	Buruk	20,00 – 39,99
3	Kurang baik	40,00 – 59,99
4	Baik	60,00 – 79,99
5	Sangat Baik	80,00 – 99,99

Berdasarkan tabel-tabel sebelumnya maka dibuat hasil keseluruhan sebagai kesatuan variabel Komunikasi.

Tabel IV.45  
Kategorisasi Variabel Komunikasi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	%	Kumulatif %
1	Sangat Buruk	11	27,5	27,5
2	Buruk	3	7,5	35,0
3	Biasa saja	11	27,5	62,5
4	Baik	13	32,5	95,0
5	Sangat Baik	2	5,0	100,0
	Jumlah	40	100,0	

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.30 s/d 35

Tabel IV.45 menunjukkan jumlah kategori baik dari variabel Komunikasi yaitu penilaian sangat baik ditambah baik, sehingga kategori baik adalah sebesar 37,5 %. Variabel komunikasi secara umum dikategorikan buruk., karena ada beberapa faktor dalam penelitian menunjukkan kurang baik, antara lain disebabkan pelaksana BKM P2KP belum mampu menciptakan komunikasi yang harmonis dengan para anggota penerima manfaat baik lewat forum rapat, pertemuan, kotak surat sehingga komunikasi yang baik belum dapat tercipta dan mengakibatkan penerima manfaat menyimpulkan sendiri bahwa BKM P2KP tidak lebih seperti halnya koperasi simpan pinjam lain yang tidak mengemban tanggung jawab penanggulangan kemiskinan.

### **C. Analisis Hasil Penelitian**

#### **C.1. Hubungan antara Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP**

Terdapat kecenderungan lemah dan tidaknya hubungan antara Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP, dapat dilihat pada tabel IV.46 berikut ini.

Tabel IV.46  
Hubungan antara Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP

			Implementasi Kebijakan P2KP					Total
			1 Sangat Buruk	2 Buruk	3 biasa saja	4 Baik	5 Sangat Baik	
Kemampuan Organisasi	5 Sangat Baik	Count % within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 40.0%	3 60.0%	5 100.0%
	4 Baik	Count % within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	1 5.3%	16 84.2%	2 10.5%	19 100.0%
	3 Biasa saja	Count % within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	12 80.0%	3 20.0%	0 .0%	15 100.0%
	2 Buruk	Count % within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	1 100.0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	1 100.0%
	1 Sangat Buruk	Count % within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%
Total		Count % within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	1 2.5%	13 32.5%	21 52.5%	5 12.5%	40 100.0%

= dominan

= tidak dominan

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.13 s/d 20

Tabel IV.46 menunjukkan pada garis diagonal tabel terdapat 4 (empat) nilai korelasi yang dominan, hal ini berarti hubungan Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP sangat kuat dan signifikan.

Peningkatan kemampuan organisasi harus dilakukan dengan berorientasi kepada penguatan kemampuan organisasi BKM P2KP untuk pengelolaan simpan pinjam, perencanaan penataan lingkungan yang menyeluruh di wilayah kelurahan terutama pada kantong-kantong pemukiman keluarga miskin yang umumnya perlu peningkatan, penguatan lembaga kemasyarakatan mulai dari

lembaga RT, RW, LKMD, PKK, Karang Taruna termasuk BKM yang merupakan keterwakilan dari anggota lembaga kemasyarakatan tersebut. Diharapkan pemahaman mereka semakin bertambah dan pelaksanaan sesuai dengan tujuan utama P2KP mengentaskan keluarga miskin melalui 3 (tiga) pendekatan utama : ekonomi, penataan lingkungan hunian dan penguatan lembaga kemasyarakatannya.

### C.2. Hubungan antara Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan P2KP

Tabel IV.47  
Hubungan antara Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan P2KP

			Implementasi Kebijakan P2KP					Total
			1 Sangat Buruk	2 Buruk	3 Biasa saja	4 Baik	5 Sangat Baik	
Pengawasan	5 Sangat Baik	Count % within Implementasi kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	0 .0%	3 42.9%	4 57.1%	7 100.0%
	4 Baik	Count % within Implementasi kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	0 .0%	11 91.7%	1 8.3%	12 100.0%
	3 Biasa saja	Count % within Implementasi kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	2 22.2%	7 77.8%	0 .0%	9 100.0%
	2 Buruk	Count % within Implementasi kebijakan P2KP	0 .0%	1 100.0%	10 90.9%	0 .0%	0 .0%	11 100.0%
	1 Sangat Buruk	Count % within Implementasi kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	1 100.0%	0 .0%	0 .0%	1 100.0%
Total		Count % within Implementasi kebijakan P2KP	0 .0%	1 2.5%	13 32.5%	21 52.5%	5 12.5%	40 100.0%

= dominan

= tidak dominan

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.21 s/d 29

Tabel IV.47 menunjukkan menunjukkan pada garis diagonal tabel terdapat 3 (tiga) nilai korelasi yang dominan, hal ini berarti hubungan Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan P2KP sangat kuat dan signifikan.

Peningkatan pengawasan harus segera dilakukan secara menyeluruh yaitu dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk mengelola tunggakan terutama tunggakan macet BKM P2KP tidak memiliki kemampuan yang mencukupi ditambah kewenangan yang terbatas. Langkah yang perlu diambil dalam waktu dekat adalah bersama-sama Pemerintah Kelurahan Cepu untuk mengelola tunggakan-tunggakan yang ada di KSM warga masyarakat Kelurahan Cepu, diharapkan akan mengurangi prosentase tunggakan yang ada.

### C.3. Hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP

Tabel IV.48  
Hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP

		Implementasi Kebijakan P2KP					Total	
		1 Sangat Buruk	2 Buruk	3 Biasa saja	4 Baik	5 Sangat Baik		
Komunikasi	5 Sangat Baik	Count ¼ within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	0 .0%	0 .0%	2 100.0%	2 100.0%
	4 Baik	Count ¼ within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	0 .0%	12 92.3%	1 7.7%	13 100.0%
	3 Biasa saja	Count ¼ within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	1 100.0%	0 .0%	8 72.7%	2 18.2%	11 100.0%
	2 Buruk	Count ¼ within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	2 66.7%	1 33.3%	0 .0%	3 100.0%
	1 Sangat Buruk	Count ¼ within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	0 .0%	11 100.0%	0 .0%	0 .0%	11 100.0%
Total		Count ¼ within Implementasi Kebijakan P2KP	0 .0%	1 2.5%	13 32.5%	21 52.5%	5 12.5%	40 100.0%

= dominan

= tidak dominan

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.30 s/d 35

Tabel IV.48 menunjukkan menunjukkan pada garis diagonal tabel terdapat 2 (dua) nilai korelasi yang dominan, hal ini berarti hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP kuat dan signifikan.

Peningkatan komunikasi harus segera dilakukan, komunikasi yang selama ini dilakukan terbukti tidak efektif yaitu hanya mendudukan mereka sebagai penerima manfaat saja tanpa

menanyakan kebutuhan mereka dan memperkuat lembaga kemasyarakatannya. Peningkatan tersebut dengan menyebarkan kembali visi, misi P2KP kepada keluarga miskin dan masyarakat kelurahan Cepu dalam bentuk pamflet dan disebarluaskan untuk membangun pemahaman masyarakat akan maksud P2KP. Menyebarkan brosur untuk diisi oleh KSM Keluarga miskin kebutuhan mendasar apa saja yang menjadi keinginan mereka.

#### C.4. Hubungan antara Kemampuan Organisasi, Pengawasan dan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP

Tabel IV.49  
Uji Statistik hubungan antara Kemampuan Organisasi, Pengawasan dan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP (Rumus Koefisien Korelasi Kendall's)

		Implementasi Kebijakan	Kemampuan Organisasi	Pengawasan	Komunikasi	
Kendall's tau_b	Implementasi Kebijakan	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	1,000 . 40	,771(**) ,000 40	,793(**) ,000 40	,687(**) ,000 40
	Kemampuan Organisasi	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	,771(**) ,000 40	1,000 . 40	,724(**) ,000 40	,623(**) ,000 40
	Pengawasan	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	,793(**) ,000 40	,724(**) ,000 40	1,000 . 40	,802(**) ,000 40
	Komunikasi	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	,687(**) ,000 40	,623(**) ,000 40	,802(**) ,000 40	1,000 . 40

\*\* Koefisien korelasi signifikan pada level 1 % (2-tailed)

Diolah dari jawaban pertanyaan kuesioner no.1 s/d 35

Tabel IV.49 menunjukkan hubungan positif signifikan antara variabel kemampuan organisasi dengan variabel implementasi kebijakan P2KP. Semakin meningkat kemampuan organisasi maka semakin meningkat implementasi kebijakan P2KP dan sebaliknya.

### C.5. Pengujian Hipotesis Alternatif ( Minor )

#### C.5.1. Hubungan antara kemampuan organisasi ( X 1 ) dengan implementasi kebijakan ( Y )

Tabel IV.50  
Uji Statistik hubungan antara Kemampuan Organisasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP  
(Rumus Koefisien Korelasi Kendall's)

Correlations			Kemampuan Organisasi	Implementasi Kebijakan
Kendall's tau_b	Kemampuan Organisasi	Correlation Coefficient	1,000	,771(**)
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	40	40
	Implementasi Kebijakan	Correlation Coefficient	,771(**)	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	40	40

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel IV.50 menunjukkan ada hubungan yang signifikan (0,000) antara variabel Kemampuan Organisasi (X1) dengan variabel Implementasi Kebijakan P2KP (Y)

yang ditunjukkan dengan nilai koefisien rank Kendall's sebesar 0,771.

### C.5.2. Hubungan antara Pengawasan ( X 2 ) dengan implementasi kebijakan ( Y )

Tabel IV.51  
Uji Statistik hubungan antara Pengawasan dengan Implementasi Kebijakan P2KP  
(Rumus Koefisien Korelasi Kendall's)

Correlations				
			Pengawasan	Implementasi Kebijakan
Kendall's tau_b	Pengawasan	Correlation Coefficient	1,000	,793(**)
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	40	40
	Implementasi Kebijakan	Correlation Coefficient	,793(**)	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	40	40

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel IV.51 menunjukkan ada hubungan yang signifikan (0,000) antara variabel Pengawasan (X2) dengan variabel Implementasi Kebijakan P2KP (Y) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien rank Kendall's sebesar 0,793.

### C.5.3. Hubungan antara Komunikasi ( X 3 ) dengan implementasi kebijakan ( Y )

Tabel IV.52  
Uji Statistik hubungan antara Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan P2KP  
(Rumus Koefisien Korelasi Kendall's)

Correlations			Komunikasi	Implementasi Kebijakan
Kendall's tau_b	Komunikasi	Correlation Coefficient	1,000	,687(**)
		Sig. (2-tailed)	.	,000
		N	40	40
	Implementasi Kebijakan	Correlation Coefficient	,687(**)	1,000
		Sig. (2-tailed)	,000	.
		N	40	40

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel IV.52 menunjukkan ada hubungan yang signifikan (0,000) antara variabel Komunikasi (X3) dengan variabel Implementasi Kebijakan P2KP (Y) yang ditunjukkan dengan nilai koefisien rank Kendall's sebesar 0,687.

#### C.6. Pengujian Hipotesis Alternatif ( Mayor )

Hasil koefisien uji konkordansi Kendall's akan membuktikan apakah keempat variabel saling berhubungan atau tidak, adakah keselarasan dalam menilai keempat variabel penelitian.

Tabel IV.53  
NPar test Kendall's W Test

Ranks	
	Mean Rank
Implementasi Kebijakan	3,03
Kemampuan Organisasi	2,91
Pengawasan	2,38
Komunikasi	1,69

Tabel IV.54  
NPar test Kendall's W Test

Test Statistics	
N	40
Kendall's W(a)	,366
Chi-Square	43,947
df	3
Asymp. Sig.	,000

a. Kendall's Coefficient of Concordance

Tabel IV.53 dan 54 menunjukkan hasil pengujian hipotesis mayor, ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel X1, X2, X3 dengan Y pada tingkat signifikansi 0,000 dengan nilai koefisien konkordansi Kendall's ( W ) sebesar 0,366.

#### **D. Diskusi**

Hasil penelitian Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) Kabupaten Blora menunjukkan bahwa kemampuan organisasi, pengawasan dan komunikasi masih rendah, masing-masing dan bersama-sama menjadikan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) rendah.

Hasil penelitian lain, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Nasional Australia dan P3PK-UGM tanggal 8-11 Juli 1985 (**Mubyarto dan Ari Basuki, 1989:23-24**) dan dipaparkan dalam seminar nasional tekanan penduduk dan perubahan sosial ekonomi di perdesaan Jawa. Penelitian tersebut menentukan 6 (enam) kabupaten masing-masing : Tegal, Grobogan, Kebumen, Purworejo (Jawa Tengah), Kediri dan Jember (Jawa Timur). Penelitian menggunakan pendekatan sosial ekonomi dan historis. Keenam kabupaten yang diteliti itu ditemukan adanya keanekaragaman dalam susunan sosio-ekonomi dan pola reaksi masyarakat terhadap pertumbuhan jumlah penduduk. Diantara keenam Kabupaten tersebut ada yang mobilitas penduduknya mencolok, terutama Purworejo dan Tegal; ada yang mobilitas penduduknya rendah sekali termasuk Grobogan yang tanahnya tidak subur; ada juga yang mobilitas penduduknya sedang, yaitu yang

penduduknya kadang-kadang sebagian pergi ke luar daerah tetapi kemudian kembali ke kampung halaman.

Keanekaragaman dalam kegiatan sosio-ekonomi di suatu daerah merupakan sumber kekuatan dalam menghadapi fluktuasi ekonomi nasional dan internasional.

Impelementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) Kabupaten Blora dengan faktor komunikasinya buruk menghambat upaya pengentasan kemiskinan terutama dalam menjembatani keanekaragaman dalam susunan sosio-ekonomi dan pola reaksi masyarakat terhadap pertumbuhan jumlah penduduk

Penelitian lain yaitu mengenai studi implementasi P2KP di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang oleh V.W Novita Dewi di tahun 2003. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan fenomenologis, beberapa fenomena yang diamati yaitu : kemiskinan, pemberdayaan dan implementasi P2KP. Penelitian tersebut menemukan fakta bahwa kelompok sasaran P2KP di Kecamatan Semarang Utara mempunyai budaya yang fatalistik, sehingga kesesuaian fungsi antara program dan penerima bantuan, program dan organisasi pelaksana serta penerima bantuan, program dan organisasi pelaksana akan sulit terwujud.

Kesesuaian fungsi-fungsi yang dimaksud dapat ditingkatkan melalui upaya *role clarity*, yang harus dilaksanakan di lapangan secara konsisten.

Peningkatan kemampuan organisasi harus dilakukan dengan berorientasi kepada penguatan kemampuan organisasi BKM P2KP untuk pengelolaan simpan pinjam, perencanaan penataan lingkungan yang menyeluruh di wilayah kelurahan terutama pada kantong-kantong pemukiman keluarga miskin yang umumnya perlu peningkatan, penguatan lembaga kemasyarakatan mulai dari lembaga RT, RW, LKMD, PKK, Karang Taruna termasuk BKM yang merupakan keterwakilan dari anggota lembaga kemasyarakatan tersebut.

Diharapkan pemahaman mereka semakin bertambah dan pelaksanaan sesuai dengan tujuan utama P2KP mengentaskan keluarga miskin melalui 3 (tiga) pendekatan utama : ekonomi, penataan lingkungan hunian dan penguatan lembaga kemasyarakatannya.

Pengawasan yang dilakukan BKM P2KP selama ini kurang, hal ini pula yang menyebabkan tunggakan bertambah tiap tahun dan tujuan P2KP mengentaskan keluarga miskin melalui pendekatan ekonomi, penataan lingkungan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tidak dapat dicapai dengan maksimal. Kondisi yang seperti ini dibiarkan maka P2KP diperkirakan akan mengalami seperti program yang diberikan

oleh pemerintah sebelumnya yaitu program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUT, UED-SP, UP2K dan program lain di masa lalu.

Laporan keuangan tahun 2005 bahwa kategori tunggakan yang macet (diatas 21 bulan) untuk KSM BKM "MAKMUR SENTOSA" per Januari 2005 sebesar Rp. 113.635.667,00 (Seratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah). Kategori kredit secara administrasi dibagi menjadi : kredit lancar (0-3 bulan), kurang lancar (4-6 bulan), diragukan (7-21 bulan) dan macet (lebih 21 bulan).

Peningkatan pengawasan harus segera dilakukan secara menyeluruh yaitu dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan. Untuk mengelola tunggakan terutama tunggakan macet BKM P2KP tidak memiliki kemampuan yang mencukupi ditambah kewenangan yang terbatas. Langkah yang perlu diambil dalam waktu dekat adalah bersama-sama Pemerintah Kelurahan Cepu untuk mengelola tunggakan-tunggakan yang ada di KSM warga masyarakat Kelurahan Cepu, diharapkan akan mengurangi prosentase tunggakan yang ada.

Peningkatan komunikasi harus segera dilakukan, komunikasi yang selama ini dilakukan terbukti tidak efektif yaitu hanya mendudukan mereka sebagai penerima manfaat saja tanpa menanyakan kebutuhan mereka dan memperkuat lembaga kemasyarakatannya.

Kondisi ini terjadi disebabkan program yang dilakukan selama ini walaupun sudah baik dalam pengelolaannya tetapi tanggapan dari sebagian penerima manfaat biasa-biasa saja. Penerimaan tersebut mengakibatkan program berjalan seperti program yang diberikan sebelumnya yaitu program IDT (Inpres Desa Tertinggal).

Peningkatan tersebut dengan menyebarluaskan kembali visi, misi P2KP kepada keluarga miskin dan masyarakat kelurahan Cepu dalam bentuk pamflet dan disebarluaskan untuk membangun pemahaman masyarakat akan maksud P2KP. Menyebarkan brosur untuk diisi oleh KSM Keluarga miskin kebutuhan mendasar apa saja yang menjadi keinginan mereka. Pertemuan-pertemuan dengan melibatkan seluruh komponen KSM bersama BKM dan Pemerintah Kelurahan Cepu agar ditingkatkan, dengan mengagendakan pertemuan 3 bulan sekali.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Setelah penulis melakukan semua tahapan dalam penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora (Studi Kasus Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ). Penulis mengajukan simpulan dan saran-saran dengan harapan dapat memberi masukan kepada pemerintah dan akan semakin membuahkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan banyak pihak, dan untuk kelancaran pelaksanaan program-program selanjutnya.

#### **A. Simpulan**

1. Ada hubungan positif dan signifikan antara rendahnya kemampuan organisasi dengan rendahnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;
2. Ada hubungan positif dan signifikan antara rendahnya pengawasan dengan rendahnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;

3. Ada hubungan positif dan signifikan antara komunikasi yang kurang efektif dengan rendahnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;
4. Ada hubungan positif dan signifikan antara rendahnya kemampuan organisasi, rendahnya pengawasan dan komunikasi yang kurang efektif secara bersama-sama dengan rendahnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora ;

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan P2KP Kelurahan Cepu secara umum baik dengan persentase sebesar 65 %. Kondisi tersebut didukung oleh kenyataan di lapangan bahwa dana pinjaman P2KP sangat membantu usaha produktif masyarakat miskin dan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga miskin ke taraf yang lebih baik .

Akan tetapi terdapat kendala di lapangan bahwa dana P2KP untuk peningkatan sarana dan prasarana kurang dan P2KP belum mampu mengentaskan kemiskinan keluarga miskin.

Kemampuan Organisasi secara umum baik dengan persentase sebesar 60 %. Kondisi tersebut didukung oleh kenyataan di lapangan bahwa tenaga pelaksana P2KP mencukupi dan tingkat pendidikan

tenaga pelaksana P2KP memadai untuk mendukung pelaksanaan program.

Akan tetapi terdapat kendala di lapangan bahwa organisasi pelaksana P2KP kurang dalam upaya-upaya peningkatan kualitas kemampuan SDM pegawainya dan organisasi P2KP memiliki kewenangan yang terbatas.

Pengawasan secara umum kurang baik dengan persentase sebesar 47,5 %. Kondisi tersebut mungkin didukung oleh ketersediaan aturan-aturan pelaksana P2KP tersedia dan aturan-aturan yang jelas dan mudah dipahami. Kendala yang ada adalah bahwa penetapan standard dalam aturan pelaksanaan P2KP kurang sesuai dengan kondisi riil masyarakat miskin sehingga pelaksanaannya pun selama ini kurang sesuai dengan kebutuhan Kelurahan Cepu.

Komunikasi secara umum buruk dengan persentase sebesar 37,5 %, karena persentase terbesar masyarakat miskin yang tergabung dalam KSM BKM menyampaikan permasalahannya hanya pada saat dilakukan rapat tahunan BKM. Organisasi pelaksana P2KP Kelurahan Cepu ( BKM, Kelurahan Cepu, Kader masyarakat

dan Fasilitator Kelurahan) selama ini jarang berkomunikasi dan berkoordinasi dalam melaksanakan P2KP.

## **B. Saran-saran**

1. Implementasi kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora melalui P2KP yang dilaksanakan sudah cukup baik, namun terdapat beberapa kendala, yaitu :

- 1.1. Dana P2KP untuk peningkatan sarana dan prasarana kurang

P2KP dilaksanakan dengan tiga pendekatan, yaitu ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana dan penguatan lembaga kemasyarakatan. Organisasi pelaksana BKM P2KP selama ini lebih menekankan kepada pendekatan ekonomi, dalam hal ini simpan pinjam P2KP, dan mengesampingkan dua pendekatan lainnya. Padahal ukuran keberhasilan program P2KP tidak hanya dilihat dari bertambahnya dana P2KP setiap tahunnya dari bunga simpan pinjam tetapi terwujudnya kemandirian (*empowerment*) masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran untuk meningkatkan ekonominya, pemukimannya dan lembaga kemasyarakatannya. Direkomendasikan agar BKM P2KP mengalokasikan dana

P2KP secara berimbang, misalnya alokasi untuk simpan pinjam (60 %), peningkatan sarana dan prasarana (20 %) dan penguatan lembaga kemasyarakatan (20 %).

## 1.2. P2KP belum mampu mengentaskan keluarga miskin

Organisasi pelaksana BKM P2KP selama ini lebih menekankan kepada pendekatan ekonomi daripada dua pendekatan lainnya. Akibatnya tujuan P2KP untuk mengentaskan keluarga miskin belum optimal. Selanjutnya BKM P2KP agar mengoptimalkan upaya peningkatan sarana dan prasarana dan penguatan lembaga kemasyarakatan. Direkomendasikan agar dana penataan lingkungan kumuh (keluarga miskin) alokasinya ditambah hingga mencapai 20 %, melibatkan secara aktif lembaga kemasyarakatan yang ada, seperti RT, RW, PKK, Karang Taruna dan LKMD.

2. Kemampuan organisasi BKM P2KP saat ini sudah cukup baik, namun terdapat beberapa kendala, yaitu :

2.1. Organisasi pelaksana BKM P2KP kurang dalam upaya-upaya peningkatan kualitas SDM pegawainya.

Organisasi pelaksana BKM P2KP disarankan mengadakan pelatihan kerja bekerja sama dengan Konsultan Manajemen Wilayah dan lembaga terkait (Gambar I.1) berkaitan dengan tugas utama BKM P2KP di bidang ekonomi simpan pinjam, pembangunan sarana dan prasarana dan penguatan lembaga kemasyarakatan. Pemahaman terhadap P2KP yang kurang selama ini mengakibatkan BKM P2KP hanya terjebak dalam usaha simpan pinjam saja. Hal ini dikarenakan BKM P2KP memiliki pemahaman bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan dana P2KP adalah bertambahnya modal awal P2KP tiap tahunnya.

## 2.2. Organisasi pelaksana BKM P2KP memiliki kewenangan yang terbatas.

Kewenangan yang dimiliki oleh organisasi BKM P2KP sebatas mengelola P2KP. Ketika terjadi tunggakan yang bertambah tiap tahunnya BKM tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan paksaan dan hanya sebatas memberikan sanksi moral dengan tidak memberikan pinjaman berikutnya.

BKM P2KP direkomendasikan untuk membuat usulan kepada Konsultan Manajemen Wilayah untuk dilakukan restrukturisasi organisasi pelaksana P2KP, sehingga terjadi

Organisasi pelaksana BKM P2KP selama ini dapat dikatakan berjalan sesuai jalur komando saja (Gambar I.1) dimana BKM bertanggung jawab langsung kepada Konsultan Manajemen Wilayah P2KP melalui fasilitator Kelurahan. Hubungan struktur organisasi dengan Kelurahan Cepu hanyalah hubungan administrasi. Dengan demikian disarankan organisasi pelaksana BKM P2KP selanjutnya harus meningkatkan koordinasi hubungan administrasi dengan Kelurahan Cepu untuk mengetahui secara lebih baik kebutuhan mendesak apa saja di tingkat Kelurahan Cepu.

4. Komunikasi yang terjadi saat ini dikategorikan buruk, karena beberapa kendala, yaitu :

4.1. Persentase terbesar masyarakat miskin menyampaikan permasalahannya hanya pada saat dilakukannya rapat tahunan BKM P2KP. Kondisi seperti ini tentu sangat tidak mendukung keberhasilan pelaksanaan P2KP di Kelurahan Cepu. Dengan demikian BKM P2KP harus secara aktif melakukan pertemuan triwulan dengan melibatkan seluruh anggota KSM untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan permasalahan yang mereka hadapi. Upaya lain dengan menyebarkan daftar isian

untuk diisi oleh KSM Keluarga miskin mengenai kebutuhan mendasar apa saja yang menjadi keinginan mereka

4.2. Organisasi pelaksana BKM P2KP selama ini jarang berkoordinasi dengan unit-unit organisasi pelaksana P2KP lainnya (Gambar I.1) seperti Kelurahan Cepu, Kader Masyarakat dan Fasilitator Kelurahan.

Keberhasilan P2KP tentunya menjadi tanggung jawab organisasi pelaksana P2KP dan menjadi keharusan organisasi pelaksana BKM P2KP untuk melakukan koordinasi yang baik dengan unit-unit organisasi yang lain untuk meningkatkan pencapaian hasil pelaksanaan P2KP. Selanjutnya BKM P2KP harus membangun koordinasi yang baik sesuai dengan aturan pelaksanaan P2KP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Dewanta, A.S. ed., 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta
- Dunn, William N., 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, PT. Hanindita Graha Widya, Yogyakarta
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC
- Effendy, Onong Uchjana, 1997, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Gibson et. al, 1996, *Organisasi*, Binarupa Aksara, Jakarta
- Imawan, Riswanda, 1999, *Menyusun Konsep dan Variabel Penelitian, Pelatihan Media Poling untuk Wartawan*, IMW-IFES-USAOD-Jawa Pos.
- Islamy, M. Irfan 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara.
- Lubis, Ibrahim, 1988, *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Ghalia, Jakarta
- Moenir, AS, 1985, *Pendekatan Manusiawi dan organisasi terhadap pembinaan Kepegawaian*, Gunung Agung, Jakarta
- Mubyarto dan Ari Basuki, 1989, *Seminar Pedesaan*, P3PK UGM, Yogyakarta
- Ndraha, Talizidhuhu, 1999, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Quade, E.S, 1984, *Analysis for Public Decisions*, North-Holland, New York

- Ron Ludlow and Fergus Panton, 2000, *effective Communication*, Pearson Education Asia Pte, Ltd, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Robbin, Stephen P., 2001, *Perilaku Organisasi*, PT. Prenhalindo, Jakarta.
- Siagian, Sondang P., 1986, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta
- Sarwoto, 1988, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia-Indonesia, Jakarta
- Singarimbun, Masri , 1989, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta
- Samodra, Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, ALFABETA, Bandung.
- Thoha, Miftah, 2002, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Mulyarto, 1996, *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, PT. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Umar, Husein, 2002, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Winardi, 1983, *Azas-azas Manajemen*, Alumni, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul, 1997, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi, 1998, *Teori Kebijakan Publik*, PT. Citra Aditya, Bandung.

**Tesis :**

- Dewi V.W. Novita, 2003, *Studi Implementasi Program/proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang(Tesis)*, PPS Undip, Semarang